

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERANAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAMPAR
DALAM MENGEMBANGKAN KAWASAN BUDIDAYA
PERIKANAN DI KECAMATAN TAPUNG HILIR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Oleh:

Pahrul Rozi

NPM: 147310150

**PROGRAM STUDI
S1 ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019**

ABSTRAK

Peranan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Dalam Mengembangkan Kawasan Budidaya Perikanan di Kecamatan Tapung Hilir

Oleh:

Pahrul Rozi
NPM: 147310150

Besarnya potensi untuk dijadikan kawasan perikanan di Kecamatan Tapung Hilir, namun belum adanya langkah Dinas Perikanan Kabupaten Kampar melakukan inovasi untuk mengembangkan budidaya perikanan. Padahal saat ini telah terdapat lebih dari 50 keramba yang terdapat di Kecamatan Tapung Hilir. Dengan demikian tujuan penelitian untuk mengetahui peranan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Dalam Mengembangkan Kawasan Budidaya Perikanan Di Kecamatan Tapung Hilir. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Dalam Mengembangkan Kawasan Budidaya Perikanan Di Kecamatan Tapung Hilir. Indikator ditetapkan dalam penelitian ini menurut pendapat Siagian yakni stabilisator, inovator, dan pelopor. Tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Key informan penulis adalah Kepala Bidang Sumber Daya Perikanan dan Kelembagaan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dengan informan yakni Camat Tapung Hilir, Tenaga Penyuluh Perikanan Dinas Perikanan UPT Kecamatan Tapung Hilir, dan 3 orang Pelaku usaha budidaya perikanan di Kecamatan Tapung Hilir. Teknik pengumpulan data yaitu melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Peranan Dinas Perikanan dalam mengembangkan kawasan budi daya perikanan di Kecamatan Tapung Hilir belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal. Di mana Dinas Perikanan sudah melakukan langkah sebagai stabilisator dan melakukan peloporan kepada pembudidaya perikanan, tetapi belum melakukan inovator terhadap budi daya perikanan. Dengan demikian jelaslah bahwa peranan Dinas Perikanan masih sebatas melaksanakan fungsi sebagai pelaksana di bidang perikanan belum sampai kepada melakukan inovasi bidang perikanan. Dalam mengembangkan kawasan budi daya perikanan di Kecamatan Tapung Hilir terdapat kendala dalam pelaksanaannya yakni kendala sumber daya anggaran dan kebijakan yang belum ada.

Kata Kunci: Peranan, Mengembangkan Kawasan Budidaya Perikanan

ABSTRACT

The Role of Dinas Perikanan Kampar Regency in Developing Fisheries Cultivation Areas in Tapung Hilir District

By:

Pahrul Rozi
NPM: 147310150

The magnitude of the potential to be used as a fishery area in Tapung Hilir District, but there is no step yet by the Dinas Perikanan Kampar Regency to innovate to develop aquaculture. Even though there are currently more than 50 cages in Tapung Hilir District. Thus the research objective is to determine the role of the Kampar District Fisheries Service in Developing Aquaculture Areas in the District of Tapung Hilir. To find out the obstacles faced by the Kampar District Fisheries Service in Developing Aquaculture Areas in the District of Tapung Hilir. The indicators set out in this study are in Siagian's opinion namely stabilizers, innovators, and pioneers. Type of qualitative research with a descriptive approach. The key informant writer is the Head of Fisheries and Institutional Resources Division of the Kampar District Fisheries Office with informants namely the Tapung Hilir Sub-District Head, Fisheries Extension Workers of the UPT District of Tapung Hilir Fisheries, and 3 people in the aquaculture business in Tapung Hilir District. Data collection techniques are observation, interview and documentation. Based on the results of the study concluded that the role of the Fisheries Department in developing the area of fisheries cultivation in the District of Tapung Hilir has not fully run optimally. Where the Fisheries Service has taken steps to stabilize and report to fisheries cultivators, but has not yet innovated fisheries cultivation. Thus it is clear that the role of the Fisheries Service is still limited to carrying out its function as an executor in the field of fisheries not yet to innovate in the field of fisheries. In developing the area of fisheries cultivation in the District of Tapung Hilir there are obstacles in its implementation namely constraints of budget resources and policies that do not yet exist.

Keywords: Role, Developing Fisheries Cultivation Areas

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Peranan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Dalam Mengembangkan Kawasan Budidaya Perikanan di Kecamatan Tapung Hilir” Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan rasa terima kasih yang se dalam-dalamnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau serta jajaran dosen ilmu pemerintahan yang telah memfasilitasi serta memberikan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat mebantukan penulis dalam penyusunan skripsi ini
4. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yusa, S.IP., MA selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan tunjuk ajarnya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

5. Ibu Nina Yuslaini, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing II yang dengan sabar dan telah banyak membantu mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar yang telah bersedia memberikan data awal yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Masyarakat pembudidaya perikanan di Kecamatan Tapung Hilir yang bersedia meluang waktunya dalam rangka pengumpulan data penelitian ini.
8. Buat Ibunda dan Ayahanda yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepala penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Kepada teman-teman yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maupun dalam perkuliahan yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan. Terima kasih.

Pekanbaru, Desember 2019

Ttd
Penulis,

Pahrul Rozi
NPM: 147310150

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
SURAT PERNYATAAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN 12	
A. Studi Kepustakaan.....	12
1. Pengertian Pemerintahan.....	12
2. Urusan Pemerintah	13
3. Konsep Pemerintahan Daerah	19
4. Teori Kebijakan.....	20
5. Teori Peranan	21
6. Konsep Pengembangan Wilayah	25
7. Konsep Budidaya Perikanan	30
B. Penelitian Terdahulu	32
C. Kerangka Pikiran.....	34
D. Konsep Operasional	36
E. Operasionalisasi Variabel.....	38

BAB III : METODE PENELITIAN	39
A. Tipe Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Key Informan dan Informan.....	40
D. Teknik Penarikan Key Informan dan Informan	41
E. Jenis dan Sumber Data	42
F. Teknik Pengumpulan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data.....	43
H. Jadwal Waktu Penelitian.....	46
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	48
A. Gambaran Umum kabupaten Kampar.....	48
B. Gambaran Dinas Perikanan Kabupaten Kampar.....	52
C. Modal Jaring Apung.....	62
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Peranan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Dalam Mengembangkan Kawasan Budidaya Perikanan di Kecamatan Tapung Hilir.....	63
1. Stabilisator	64
2. Inovator	75
3. Pelopor	76
B. Faktor Penghambat Peranan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Dalam Mengembangkan Kawasan Budidaya Perikanan di Kecamatan Tapung Hilir.....	83
BAB VI : PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR KEPUSTAKAAN	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Jumlah Petani Ikan Air Tawar di Kabupaten Kampar Tahun 2017	6
II.1 Penelitian Terdahulu	31
II.2 Operasional Variabel Tentang Peranan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Dalam Mengembangkan Kawasan Budidaya Perikanan Di Kecamatan Tapung Hilir	37
III.1 Informan Penelitian.....	40
III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Peranan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Dalam Mengembangkan Kawasan Budidaya Perikanan Di Kecamatan Tapung Hilir	46
IV.1 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar Menurut Kecamatan Tahun 2018.....	50
V.1 Jenis Bantuan Yang Diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1	Kerangka Pikir Tentang Peranan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Dalam Mengembangkan Kawasan Budidaya Perikanan di Kecamatan Tapung Hilir.....	34
III.1	Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif.....	43
IV.1	Peta Kabupaten Kampar	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Daftar Pertanyaan Wawancara
2. Jawaban Pertanyaan Wawancara
3. Dokumentasi Penelitian
4. Surat Keterangan Penelitian



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta seminar skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pahrul Rozi
NPM : 147310150
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Peranan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Dalam Mengembangkan Kawasan Budidaya Perikanan di Kecamatan Tapung Hilir

Atas naskah yang didaftarkan pada seminar usulan penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Desember 2019
Pelaku Pernyataan,

Pahrul Rozi
NPM: 147310150

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah-daerah itu atas daerah kabupaten atau kota, yang tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang di atur dengan Undang- undang. Hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 bahwa negara Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Klasifikasi Urusan Pemerintahan terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan Pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum;
- 2) Urusan Pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah pusat;

- 3) Urusan pemerintah konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota:

1

kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, pada setiap urusan yang bersifat Konkuren ini senantiasa ada sub urusannya yang menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat dan ada sub Urusan yang diserahkan kepada pemerintah Provinsi, dan ada pula urusan yang diserahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota.

Untuk mewujudkan pembagian Urusan Konkuren secara *proporsional* antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, daerah Kabupaten atau Kota disusunlah kriteria yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan Urusan Pemerintahan antara tingkat Pemerintahan. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas:

- a. Urusan Pemerintahan Wajib
- b. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan wajib dibagi lagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- f. Sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan informatika
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olah raga
- n. Statistik
- o. Persandian

- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan
- r. Kearsipan

Di samping Urusan wajib, pemerintah Provinsi diberikan pilihan untuk mengurus Urusan yang bersifat pilihan. Urusan Pemerintahan Provinsi yang bersifat pilihan meliputi Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi daerah yang bersangkutan. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi Urusan Pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan
- b. Pariwisata
- c. Pertanian
- d. Kehutanan
- e. Energi dan Sumber Daya Mineral
- f. Perdagangan
- g. Perindustrian
- h. Transmigrasi

Dengan demikian jelaslah bahwa urusan pada bidang perikanan merupakan salah satu urusan sub Pemerintah Konkuren yang menjadi urusan pilihan pemerintah daerah sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah.

Dalam asas dekonsentrasi yang diserahkan adalah wewenang administrasi/ implementasi kebijakan sedangkan wewenang politiknya tetap menjadi

kewenangan pusat. Karena diserahkan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat hanyalah kewenangan administrasi, maka terjadi hubungan yang saling memiliki kepentingan antara Pemerintah Pusat dengan wilayah administrasi. Dengan demikian wilayah administrasi Provinsi adalah bawahan/subordinat Pemerintah Pusat dan posisinya tergantung pada Pemerintah Pusat.

Provinsi Riau memiliki 12 Kabupaten/Kota salah satunya adalah Kabupaten Kampar serta memiliki empat buah sungai besar yaitu Sungai Rokan, Sungai Siak, Sungai Kampar dan sungai Indragiri. Luas wilayah Provinsi Riau adalah 329.867.61 km yang terdiri dari 94.561.61 km daratan dan perairan lautnya 235.306 km dengan perkiraan potensi sumber daya perikanan sebanyak 446.357.6 ton/tahun (BPS Riau, 2016).

Sungai Kampar menjadi salah satu sungai besar di Riau dan memiliki potensi untuk pengembangan budi daya ikan air tawar. Di mana sungai Kampar berada mengalir dua Kabupaten yakni Kabupaten Kampar di hulunya dan Kabupaten Pelalawan di hilirnya. Di mana secara geografis, Kabupaten Kampar mempunyai letak geografis yang strategis, yang berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak di sebelah utara, Kabupaten Kuantan Singingi di sebelah selatan, dan berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatra Barat di sebelah barat, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan.

Kabupaten Kampar sebagai salah satu kabupaten minapolitan yang ditetapkan oleh Ditjen Perikanan Budi daya. Kabupaten Kampar adalah sekian dari Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau yang memiliki 2.112 hektar kolam

ikan dan 7.519 kerambah sungai dan waduk. Sayangnya potensi perikanan khususnya budidaya perikanan di Kabupaten Kampar belum tergarap maksimal. Padahal potensi perikanan budidaya air tawar di Kabupaten Kampar yang sangat besar salah satunya di Kecamatan Tapung Hilir.

Tabel I.1 Jumlah Kerambah, Petani Ikan Air Tawar dan Produksi Ikan di Kabupaten Kampar Tahun 2015-2017

No.	Kecamatan	Kerambah (Unit)			Jumlah Petani (Orang)	Jumlah Produksi (Ton)
		2015	2016	2017		
1	Kampar Kiri	67	67	67	53	58,67
2	Kampar Kiri Hulu	0	0	0	-	-
3	Kampar Kiri Hilir	22	22	22	32	5,20
4	Gunung Sahilan	0	0	0	-	-
5	Kampar Kiri Tengah	0	0	0	1	2,60
6	XIII Koto Kampar	2.157	2.157	2.157	135	12.930,48
7	Koto Kampar Hulu	0	0	0	-	-
8	Kuok	1.902	1.902	1.902	196	10.491,05
9	Salo	20	20	20	46	11,37
10	Tapung	0	0	0	-	-
11	Tapung Hulu	0	0	0	-	-
12	Tapung Hilir	10	10	10	32	1,28
13	Bangkinang Kota	38	38	38	29	19,72
14	Bangkinang	0	0	0	18	20,80
15	Kampar	2.709	2.709	2.709	1.118	2.143,87
16	Kampar Timur	86	86	86	57	59,20
17	Rumbio Jaya	60	60	60	146	33,56
18	Kampar Utara	76	76	76	146	49,20
19	Tambang	130	130	130	69	64,10
20	Siak Hulu	219	219	219	217	73,60
21	Perhentian Raja	33	33	33	28	13,80
	Jumlah	7.529	7.529	7.529	2.196	25.975,51

Sumber: BPS Kampar Dalam Angka, 2016-2018

Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan bahwa jumlah petani budi daya perikanan yang paling banyak terdapat di Kecamatan Kampar dengan jumlah 1.118 orang petani dan yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Kampar Kiri Tengah yakni sebanyak 1 orang. Sementara dari keramba jaring apung yang

diusahakan menghasilkan produksi ikan terbanyak terdapat di Kecamatan XIII Koto Kampar yakni sebanyak 12.930,48 ton setiap tahunnya. Namun pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan penelitian di Kecamatan Tapung Hilir, karena banyak kerambah yang terdapat di Kecamatan Tapung Hilir tidak terdata dan tidak memperoleh bantuan dari pemerintah daerah terutama Dinas Perikanan. Selain itu banyak persoalan lain yang dihadapi para petani ikan, seperti: mahal nya harga bibit ikan, sulitnya mendapat pakan ikan yang bersubsidi, dan sebagainya.

Untuk melaksanakan pengembangan kawasan budidaya perikanan, maka pemerintah memberikan kewenangan kepada salah satu instansi yakni Dinas Perikanan. Di mana Dinas Perikanan Kabupaten Kampar sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 56 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Perikanan merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Perikanan.

2. Fungsi

Mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang perikanan. Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, kewenangan di bidang perikanan;

2. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan bidang perikanan yang menjadi kewenangan kabupaten;
3. Melakukan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan teknis di bidang perikanan;
4. Pelaksanaan pemberian pengawasan teknis dan tugas-tugas pelaksanaan bidang perikanan;
5. Melakukan pengelolaan, pembinaan usaha dan pelayanan perizinan di bidang perikanan;
6. Pelaksanaan pembinaan terhadap pendayagunaan sumberdaya perikanan;
7. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, pengawasan, dan monitoring kegiatan perikanan tangkap;
8. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan/peralatan dan organisasi Dinas;
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
10. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
11. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan sebagai bahan penilaian sasaran kerja pegawai;
12. Pengelola UPT Dinas.

Adapun struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Kampar sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program dan Perencanaan
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perbenihan Perikanan
 - a. Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Mutu Benih
 - b. Seksi pembenihan ikan
4. Bidang Budidaya Perikanan
 - a. Seksi Produksi dan Kesehatan Ikan
 - b. Seksi Pakan Ikan
5. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan
 - a. Seksi Perizinan dan Bina Usaha Perikanan
 - b. Seksi Bina Mutu, Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan
6. Bidang Sumber Daya Perikanan dan Kelembagaan
 - a. Seksi Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan
 - b. Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Perikanan

Berdasarkan dari tugas dan fungsi tersebut, tentunya Dinas Perikanan Kabupaten Kampar telah melakukan identifikasi wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Kampar untuk diketahui potensi dan kebutuhannya akan perikanan. Di mana salah satu program pemerintah daerah Kabupaten Kampar menjadikan Kampar sebagai pusat atau sentral penghasil ikan atau disebut juga minapolitan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dilakukan pemetaan dan penetapan kawasan yang mana salah satu wilayah memiliki potensi dikembangkannya perikanan adalah Tapung Hilir. Sungai Tapung memiliki potensi untuk dikembangkannya berbagai jenis ikan endemik, sesuai ciri khas dari sungai tersebut. Jenis ikan yang menjadi potensi untuk dikembangkan adalah ikan patin, ikan selais, ikan nila, ikan belida, dan jenis ikan lainnya.

Untuk itu berlandaskan persoalan di atas peneliti tertarik untuk menfokuskan penelitian ini pada pengembangan kawasan budi daya perikanan di Kecamatan Tapung Hilir. Di mana bila diperhatikan secara seksama wilayah ini memiliki potensi pengembangan budi daya perikanan yang cukup besar. Salah satu bukti besarnya potensi yakni adanya hasil penelitian dan penetapan yang dilakukan FAO bersama Dinas Perikanan Provinsi Riau pada tahun 2018-2019 yang menetapkan Sungai Tapung sebagai salah satu sungai yang layak untuk dikembangkan dan dibudidayakan berbagai jenis ikan.

Hasil pengamatan awal di lapangan, ditemukan beberapa gejala sebagai berikut:

1. Besarnya potensi untuk dijadikan kawasan perikanan di Tapung Hilir, namun Dinas Perikanan belum mengembangkan kawasan budidaya perikanan di Kecamatan Tapung Hilir.
2. Belum adanya langkah Dinas Perikanan Kabupaten Kampar melakukan inovasi untuk mengembangkan budidaya perikanan di Kecamatan Tapung Hilir. Padahal saat ini telah terdapat lebih dari 50 keramba yang terdapat di Kecamatan Tapung Hilir.
3. Kurangnya aktifnya tenaga penyuluh perikanan selaku pelopor pengembangan perikanan di Tapung Hilir dalam memotivasi petani budidaya perikanan di Tapung Hilir.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul: **“Peranan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Dalam Mengembangkan Kawasan Budidaya Perikanan Di Kecamatan Tapung Hilir”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah penulis uraikan di atas maka penulis merumuskan masalahnya yaitu **“Bagaimana Peranan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Dalam Mengembangkan Kawasan Budidaya Perikanan Di Kecamatan Tapung Hilir”**

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Dalam Mengembangkan Kawasan Budidaya Perikanan Di Kecamatan Tapung Hilir.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Dalam Mengembangkan Kawasan Budidaya Perikanan Di Kecamatan Tapung Hilir

2. Kegunaan Penelitian

- a. Teoritis, penelitian ini dapat dijadikan bahan pengembangan Ilmu Pengetahuan yang penulis peroleh di bangku perkuliahan, sehingga bisa bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya Ilmu Pemerintahan.
- b. Praktek, dapat dijadikan bahan informasi dan masukan bagi Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Kawasan Budidaya Perikanan Di Kecamatan Tapung Hilir
- c. Akademis, hasil penelitian ini semoga berguna dan sebagai sumbangan pemikiran bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada umumnya jurusan Ilmu Pemerintahan yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemersalahan ini.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Pengertian Pemerintahan

Secara harfiah istilah pemerintah atau dalam bahasa Inggris adalah padanan dari kata *government*. Sedangkan istilah pemerintahan dalam bahasa Inggris disebut *governance* yang berarti “*Act, fact, manner, of governing*”, atau yang biasa populer disebut sebagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau tata kelola pemerintahan. *Governance* merupakan satu proses atau kegiatan, yang merupakan serangkaian kegiatan (proses) interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atau kepentingan-kepentingan yang ada.

Menurut Ndraha (2011;36) pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Munaf (2016;47) mengatakan pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai satu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam sesuatu pemerintahan/Negara.

Sedangkan menurut Syafiie (2014;12) pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (*not to do*) dalam mengoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

2. Urusan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah melimpahkan wewenang Pemerintahan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Pembagian Urusan Pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya dibagi dalam 3 kategori, yakni Urusan Pemerintahan *Absolute*, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum.

2.1 Urusan Pemerintahan *Absolute*

Urusan Pemerintahan *Absolute* adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan Pemerintahan *absolute* dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. Politik Luar Negeri, misalnya mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga Negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan Negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri
- b. Pertahanan, misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan Negara atau sebagian wilayah Negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan Sistem pertahanan Negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela Negara bagi setiap warga Negara

- c. Keamanan, misalnya mendirikan dan membentuk Kepolisian Negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang, kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan Negara.
- d. Yustisi, misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional
- e. Moneter dan Fiskal Nasional, kebijakan makro ekonomi, misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang, dan lainnya.
- f. Agama, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan satu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, dan sebagainya. Urusan agama Daerah dapat memberikan hibah untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan daerah dalam menumbuh kembangkan kehidupan beragama.

Pembagian urusan pemerintahan ini, di mana pemerintah pusat bisa menjalankan sendiri dengan berasaskan dekonsentrasi melalui pelimpahan wewenang kepada instansi vertikal yang berada di daerah ataupun gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat. Instansi vertikal yang dimaksud adalah perangkat Kementerian dan/atau lembaga pemerintah non Kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada pemerintah daerah, sehingga dalam pembentukan instansi vertikal harus ada persetujuan dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat.

Namun apabila dalam pembentukan instansi vertikal oleh Kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka tidak perlu memerlukan persetujuan dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Kewenangan Pemerintah Pusat adalah semua kewenangan Pemerintahan sebagai akibat pelimpahan dari rakyat. Namun Pemerintahan harus diselenggarakan secara desentralisasi maka sebagian kewenangan tersebut harus diserahkan kepada daerah. Dengan demikian Pemerintah Pusat hanya memiliki kewenangan 6 (enam) bidang Urusan Pemerintahan.

Sedangkan kewenangan selain 6 (enam) bidang itu menjadi kewenangan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kewenangan yang dipegang pusat adalah kewenangan yang bersifat nasional. Sedangkan kewenangan yang diserahkan kepada daerah adalah kewenangan yang bersifat lokalitas (merupakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat). Daerah diberi kebebasan untuk menemukan kewenangan yang bersifat lokalitas tersebut menurut prakarsanya sendiri (Nurcholis, 2005;160-161)

2.2 Urusan Pemerintahan Konkuren

Usuran Pemerintahan Konkuren merupakan Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, pada setiap Urusan yang bersifat Konkuren ini senantiasa ada bagian Urusan yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat dan ada bagian Urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada pula bagian Urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota.

Untuk mewujudkan pembagian Urusan yang Konkuren secara *proposional* antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, daerah Kabupaten atau Kota disusunlah kriteria yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan

mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan Urusan Pemerintahan antara tingkat Pemerintahan. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas:

- a. Urusan Pemerintahan Wajib
- b. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan wajib dibagi lagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar, yang meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- f. Sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan informatika
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olah raga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan

- q. Perpustakaan
- r. Kearsipan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagai pedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Di samping Urusan wajib, Provinsi juga mempunyai Urusan yang bersifat pilihan. Urusan Pemerintahan Provinsi yang bersifat pilihan meliputi Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi daerah yang bersangkutan (Nurcholis, 2005;169). Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi Urusan Pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan
- b. Pariwisata
- c. Pertanian
- d. Kehutanan
- e. Energi dan Sumber Daya Mineral
- f. Perdagangan
- g. Perindustrian
- h. Transmigrasi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menganut asas dekonsentrasi yang melimpahkan wewenang Pemerintahan kepada

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Dalam asas dekonsentrasi yang diserahkan adalah wewenang administrasi/implementasi kebijakan sedangkan wewenang politiknya tetap menjadi kewenangan pusat. Karena diserahkan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat hanyalah kewenangan administrasi, maka terjadi hubungan hirarki antara Pemerintah Pusat dengan wilayah administrasi. Dengan demikian wilayah administrasi Provinsi adalah bawahan/subordinat Pemerintah Pusat dan posisinya tergantung pada Pemerintah Pusat.

Di samping itu juga menganut asas desentralisasi, maka Provinsi menjadi daerah otonom (*local self government*). Implikasi *structural* dari diterapkannya asas dekonsentrasi dan sekaligus desentralisasi membuat Provinsi menjadi wilayah administrasi sekaligus daerah otonom (Nurcholis, 2005;164).

2.3 Urusan Pemerintahan Umum

Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan. Urusan Pemerintahan Umum menurut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
- c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional

- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi Pemerintahan yang ada di wilayah daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan
- g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Gubernur Dan Bupati/Walikota di wilayah kerja masing-masing dan dibantu oleh instansi vertikal. Dalam melaksanakan Urusan ini Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, dan Bupati/Walikota bertanggung jawab kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

3. Konsep Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah menurut Misdyanti dan Kartasapoetra (1993;17) adalah Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah adalah pemegang kemudi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah.

Implikasi dari ketiga asas tersebut di atas dijelaskan oleh Syafiie (2009;110) sebagai berikut :

1. Otonomi Daerah, akibat adanya desentralisasi lalu diadakan daerah otonomi yang diberikan hak wewenang dan kewajiban untuk mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Daerah Otonom, akibat adanya otonomi daerah lalu dibentuklah daerah-daerah otonom. Daerah otonom itu sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan yang meliputi provinsi, kabupaten/kota, dan desa di mana pemerintahan daerah mempunyai wewenang dalam mengatur urusannya di daerah atas dasar asas desentralisasi.

4. Teori Kebijakan

Perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah :

- a. Pengelolaan informasi, yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
- b. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
- c. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.

d. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuatan kebijakan. (Dunn, 2003;105)

Menurut Laswell, Kebijakan adalah sebagai sasaran untuk mencapai tujuan kebijakan itu tertuang dalam program yang di arahkan pada pencapaian tujuan nilai dan praktek. (dalam Lubis, 2007:19)

Syafiie (2010:150) menyebutkan : “Model kebijakan yang sesuai dengan sekarang ini adalah model sistem di mana memperhatikan desakan-desakan lingkungan yang antara lain berisi tuntutan, dukungan, atau keperluan dan hambatan, tantangan, gangguan, rintangan, ujian, kebutuhan, dan lain-lain yang mempengaruhi *public polic*, bukan sebaliknya, mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok”.

Menurut Anderson menyatakan bahwa “*Public Policies are those policies developed by govermental bodies and officials*”. Sedangkan menurut (Kansil dan Cristine, 2008;190) kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintahan sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.

5. Teori Peranan

Peranan dalam menyelenggarakan pemerintahan adalah melaksanakan tugas dan fungsi yang sudah disusun secara tegas akan memudahkan birokrasi pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, oleh karena itu untuk menghindari terjadinya disfungsi birokrasi sebagai akibat struktur yang tidak rasional, tidak diperlengkapi oleh pegawai yang betul-betul

profesional. Menurut Ndraha (2011:53) peranan diartikan sebagai perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator di setiap jenjang pemerintahan.

Menurut Siagian (2001:148) menyebutkan bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai stabilisator,
2. Sebagai inovator,
3. Sebagai pelopor.

Secara lebih jelas dan detail, peran pemerintah dalam pembangunan nasional di kemukakan oleh Siagian (2001: 142-150) yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, inovator, dan pelopor kegiatan pembangunan tertentu. Secara lebih rinci peran tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. *Stabilisator*, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan yang persuasif dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.
- b. *Inovator*, dalam memainkan peran selaku inovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki

tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya karena “menang” dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Tiga hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah, penerapan inovasi dilakukan di lingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konseptual, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.

- c. *Pelopor*, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal, positif seperti kepeloporan dalam bekerja se produktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.

Menurut pendapat Soekanto (2004:244) Peranan dapat mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sementara menurut Ndraha (2011:253) Peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau lebih telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator di setiap jenjang pemerintahan. Menurut Soekanto (2004: 243)

peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan.

Menurut Kusnandi (2005:358) ada 3 peran yang dilakukan pimpinan dalam organisasi yaitu :

1. Peran pribadi (*interpersonal role*) mengacu pada hubungan antar pemimpin dengan yang lain baik dalam organisasi maupun di luar organisasi, dalam hal ini pemimpin memiliki peran yang berbeda yaitu :
 - a. Figuran, bertindak sebagai simbol organisasi.
 - b. Peran pemimpin, bertindak untuk mendorong agar pegawainya bekerja secara produktif, efektif dan efisien dan mempengaruhi mereka bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan.
 - c. Peran perantara, pemimpin sering terlibat dalam masalah pegawai.
2. Peran berkaitan dengan informasi (*informasi role*) di mana pemimpin merupakan titik sentral bagi lalu lintas hubungan kerja sama antar pegawai yang berada dalam lingkungannya, dalam hal ini pimpinan dilibatkan dalam 3 hal yaitu :
 - a. Memantau secara terus menerus memperoleh data, pesan atau informasi dari dalam dan di luar organisasi yang di anggap relevan.
 - b. Menyebarkan informasi yang diperoleh selanjutnya disebarluaskan keseluruhan bagian organisasi.
 - c. Sebagai juru bicara.

3. Peran keputusan (*decision role*) dalam hal ini pemimpin memainkan empat peran yaitu peran wiraswasta, penanganan gangguan, pengalokasian sumber daya dan juru runding.

6. Konsep Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah merupakan strategi memanfaatkan dan mengombinasikan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan tantangan) yang ada sebagai potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi wilayah akan barang dan jasa yang merupakan fungsi dari kebutuhan baik secara internal maupun eksternal wilayah. Faktor internal ini berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya teknologi, sedangkan faktor eksternal dapat berupa peluang dan ancaman yang muncul seiring dengan interaksinya dengan wilayah lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Menurut Rustiadi, *et al.* (2011:47) wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu di mana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Sehingga batasan wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti tetapi sering kali bersifat dinamis. Komponen-komponen wilayah mencakup komponen biofisik alam, sumber daya buatan (infrastruktur), manusia serta bentuk-bentuk kelembagaan. Dengan demikian istilah wilayah menekankan

interaksi antar manusia dengan sumber daya – sumber daya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu.

Menurut Saefulhakim, dkk (2002) wilayah adalah satu kesatuan unit geografis yang antar bagiannya mempunyai keterkaitan secara fungsional. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan pewilayahan (penyusunan wilayah) adalah pendelineasian unit geografis berdasarkan kedekatan, kemiripan, atau intensitas hubungan fungsional (tolong menolong, bantu membantu, lindung melindungi) antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Wilayah Pengembangan adalah pewilayahan untuk tujuan pengembangan/pembangunan/*development*. Tujuan-tujuan pembangunan terkait dengan lima kata kunci, yaitu: (1) pertumbuhan; (2) penguatan keterkaitan; (3) keberimbangan; (4) kemandirian; dan (5) keberlanjutan. Sedangkan konsep wilayah perencanaan adalah wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan sifat-sifat tertentu pada wilayah tersebut yang bisa bersifat alamiah maupun non alamiah yang sedemikian rupa sehingga perlu direncanakan dalam kesatuan wilayah perencanaan.

Pembangunan merupakan upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik. Sedangkan menurut Anwar (2005), pembangunan wilayah dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan wilayah yang mencakup aspek-aspek pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan yang berdimensi lokasi dalam ruang dan berkaitan dengan aspek sosial ekonomi wilayah. Pengertian pembangunan dalam sejarah dan strateginya telah mengalami evolusi perubahan, mulai dari strategi pembangunan yang

menekankan kepada pertumbuhan ekonomi, kemudian pertumbuhan dan kesempatan kerja, pertumbuhan dan pemerataan, penekanan kepada kebutuhan dasar (*basic need approach*), pertumbuhan dan lingkungan hidup, dan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Pendekatan yang diterapkan dalam pengembangan wilayah di Indonesia sangat beragam karena dipengaruhi oleh perkembangan teori dan model pengembangan wilayah serta tatanan sosial-ekonomi, sistem pemerintahan dan administrasi pembangunan. Pendekatan yang mengutamakan pertumbuhan tanpa memperhatikan lingkungan, bahkan akan menghambat pertumbuhan itu sendiri (Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2003). Pengembangan wilayah dengan memperhatikan potensi pertumbuhan akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui penyebaran penduduk lebih rasional, meningkatkan kesempatan kerja dan produktifitas (Mercado, 2002).

Menurut Alkadri (2001) pengembangan adalah kemampuan yang ditentukan oleh apa yang dapat dilakukan dengan apa yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas hidup. Kata pengembangan identik dengan keinginan menuju perbaikan kondisi disertai kemampuan untuk mewujudkannya. Pendapat lain bahwa pengembangan adalah suatu proses untuk mengubah potensi yang terbatas sehingga mempengaruhi timbulnya potensi yang baru, dalam hal ini termasuk mencari peluang yang ada dalam kelompok-kelompok yang berbeda yang tidak semuanya mempunyai potensi yang sama (Budiharsono, 2002).

Prod'homme dalam Alkadri (2001) mendefinisikan pengembangan wilayah sebagai program yang menyeluruh dan terpadu dari semua kegiatan

dengan memperhitungkan sumber daya yang ada dan kontribusinya pada pembangunan suatu wilayah. Pada dasarnya pengembangan wilayah harus disesuaikan dengan kondisi, potensi dan permasalahan wilayah yang bersangkutan (Riyadi *dalam* Ambardi dan Socia, 2002).

Lebih jelas Zen dalam Alkadri (2001) menggambarkan tentang pengembangan wilayah sebagai hubungan yang harmonis antara sumber daya alam, manusia, dan teknologi dengan memperhitungkan daya tampung lingkungan dalam memberdayakan masyarakat.

Pada umumnya pengembangan wilayah mengacu pada perubahan produktivitas wilayah, yang diukur dengan peningkatan populasi penduduk, kesempatan kerja, tingkat pendapatan, dan nilai tambah industri pengolahan. Selain definisi ekonomi, pengembangan wilayah mengacu pada pengembangan sosial, berupa aktivitas kesehatan, pendidikan, kualitas lingkungan, kesejahteraan dan lainnya. Pengembangan wilayah lebih menekankan pada adanya perbaikan wilayah secara bertahap dari kondisi yang kurang berkembang menjadi berkembang, dalam hal ini pengembangan wilayah tidak berkaitan dengan eksploitasi wilayah.

Tujuan pengembangan wilayah mengandung 2 (dua) sisi yang saling berkaitan yaitu sisi sosial dan ekonomis. Dengan kata lain pengembangan wilayah adalah merupakan upaya memberikan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, misalnya menciptakan pusat-pusat produksi, memberikan kemudahan prasarana dan pelayanan logistik dan sebagainya (Triutomo, 2001).

Pengembangan wilayah dalam jangka panjang lebih ditekankan pada pengenalan potensi sumber daya alam dan potensi pengembangan lokal wilayah yang mampu mendukung (menghasilkan) pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan, serta upaya mengatasi kendala pembangunan yang ada di daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam rencana pembangunan nasional, pengembangan wilayah lebih ditekankan pada penyusunan paket pengembangan wilayah terpadu dengan mengenali sektor strategis (potensial) yang perlu dikembangkan di suatu wilayah (Friedmann & Allonso, 2008).

Sedangkan pengembangan wilayah sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen tertentu seperti (Friedman *and* Allonso, 2008):

- a) *Sumber daya lokal*. Merupakan kekuatan alam yang dimiliki wilayah tersebut seperti lahan pertanian, hutan, bahan galian, tambang dan sebagainya. Sumber daya lokal harus dikembangkan untuk dapat meningkatkan daya saing wilayah tersebut.
- b) *Pasar*. Merupakan tempat memasarkan produk yang dihasilkan suatu wilayah sehingga wilayah dapat berkembang.
- c) *Tenaga kerja*. Tenaga kerja berperan dalam pengembangan wilayah sebagai pengolah sumber daya yang ada.
- d) *Investasi*. Semua kegiatan dalam pengembangan wilayah tidak terlepas dari adanya investasi modal. Investasi akan masuk ke dalam suatu wilayah yang memiliki kondisi kondusif bagi penanaman modal.

- e) *Kemampuan pemerintah.* Pemerintah merupakan elemen pengarah pengembangan wilayah. Pemerintah yang berkapasitas akan dapat mewujudkan pengembangan wilayah yang efisien karena sifatnya sebagai katalisator pembangunan.
- f) *Transportasi dan Komunikasi.* Transportasi dan komunikasi berperan sebagai media pendukung yang menghubungkan wilayah satu dengan wilayah lainnya. Interaksi antara wilayah seperti aliran barang, jasa dan informasi akan sangat berpengaruh bagi tumbuh kembangnya suatu wilayah.
- g) *Teknologi.* Kemampuan teknologi berpengaruh terhadap pemanfaatan sumber daya wilayah melalui peningkatan output produksi dan keefektifan kinerja sektor-sektor perekonomian wilayah.

Pengembangan wilayah adalah upaya pembangunan dalam suatu wilayah administratif atau kawasan tertentu agar tercapai kesejahteraan (*people property*) melalui pemanfaatan peluang-peluang dan pemanfaatan sumber daya secara optimal, efisien, sinergi dan berkelanjutan dengan cara menggerakkan kegiatan-kegiatan ekonomi, penciptaan iklim kondusif, perlindungan lingkungan dan penyediaan prasarana dan sarana. Pada dasarnya komponen utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah adalah kemajuan ekonomi wilayah bersangkutan.

7. Konsep Budidaya Perikanan

Perikanan adalah semua usaha penangkapan budidaya ikan dan kegiatan pengelolaan hingga pemasaran hasilnya. Sedangkan sumber daya perikanan adalah seluruh binatang dan tumbuhan yang hidup di perairan (baik di darat

maupun laut), oleh karena itu perikanan dapat dibedakan atas perikanan darat dan perikanan laut (Mubiyarto, 1994;17).

Perikanan darat adalah semua usaha perikanan yang tidak dilakukan di laut luas seperti perikanan air tawar, tambak, kolam dan sebagainya. Khusus perikanan di laut ahli biologi kelautan membedakan perikanan laut dalam dua kelompok yaitu kelompok ikan pelagis (ikan yang hidup pada bagian permukaan) dan jenis ikan demersal (ikan yang hidup di dasar laut). Kelompok ikan pelagis di antaranya ikan cakalang, tuna, layang, kembung, lamun dan lain-lain. Sedangkan jenis ikan demersal seperti udang, kepiting, kakap merah dan lain-lain.

Walangadi (2003;31) mengungkapkan bahwa usaha perikanan dapat dipandang sebagai suatu perpaduan faktor produksi yang dihasilkan faktor-faktor produksi klasik tenaga kerja dan barang-barang modal atau apapun yang dianggap sejenisnya. Definisi ini mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya memperoleh hasil yang laku dijual dan tidak terbatas hanya pada kegiatan-kegiatan yang langsung dengan menangkap ikan.

Menurut Yani (2007;112) budidaya merupakan kegiatan terencana pemeliharaan sumber daya hayati yang dilakukan pada suatu areal lahan untuk diambil manfaat/hasil panennya. Budidaya perikanan adalah usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan atau organisme air lainnya. Perikanan budidaya air tawar ialah perikanan yang terdapat di sawah, sungai, danau, kolam dan rawa.

Sementara menurut Effendi (2006;1) budidaya perikanan atau perikanan budidaya adalah kegiatan memproduksi biota (organisme) akuatik (air) untuk mendapatkan keuntungan. Selain budidaya perikanan, dalam sektor perikanan

produksi biota akuatik dapat dilakukan melalui penangkapan atau perikanan tangkap. Berbeda dengan penangkapan, produksi dari budidaya perikanan diperoleh melalui kegiatan pemeliharaan biota akuatik dalam wadah dan lingkungan terkontrol. Kegiatan pemeliharaan tersebut (sesuai dengan tujuannya) mencakup pembenihan dan pembesaran. Dalam perikanan tangkap produksi diperoleh dengan cara memanen (berburu) biota akuatik dari alam tanpa pernah memelihara. Budidaya perikanan, bersama-sama dengan perikanan tangkap dan pengolahan perikanan merupakan tulang punggung sektor perikanan dalam menyediakan pangan dan sumber protein bagi manusia.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sumber rujukan dan referensi dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Tahun	Judul	Konsep Teori	Indikator
1	2	3	4	5
1	Ahlalkisman, Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL-UIR, 2018	Fungsi Dinas Perikanan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Keramba Jaring Apung Di Kabupaten Kampar	Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas masing-masing (Admosudirjo, 2001:4) Pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan (<i>power</i>) dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung (<i>disadvantaged</i>) (ife, 1995:56)	1. Akses, 2. Partisipasi. 3. Kontrol. 4. Manfaat

1	2	3	4	5
2	Desi Kartika Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2016	Peranan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Penumbuhan Dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan Tahun 2014 (Studi Di Desa Telaga Kecil Kecamatan Siantan Selatan)	Soekanto (2009:243-244) mengatakan bahwa “Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu <i>social-position</i>) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses”.	1. Memberikan suatu arahan pada proses sosialisasi 2. Pengetahuan 3. Dapat mempersatukan kelompok 4. Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol
3	Amal, Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin, 2016	Peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Barro	Soekanto (2009:243-244) “Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu <i>social-position</i>) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses”.	1. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran 2. Pengembangan sistem penyuluhan 3. Pengembangan budidaya perikanan
4	Usman, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2015	Pelaksanaan Program Pengembangan Produksi Ikan Kolam Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kampar 2010- 2013 (Studi Kasus Desa Koto Mesjid Kecamatan XII Koto Kampar)	Evaluasi adalah proses yang sederhana dalam memberikan atau menetapkan nilai kepada sejumlah tujuan kegiatan, keputusan petunjuk kerja, proses, objek dan masih banyak yang lainnya.	1. Memberi bantuan peralatan atau mesin. 2. Pelaksanaan Program pengawasan produksi ikan kolam (kewirausahaan , manajemen, dan administrasi). 3. Pembinaan

Penelitian yang peneliti laksanakan merupakan lanjutan dari penelitian terdahulu, tetapi peneliti terdapat perbedaan yang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Adapun perbedaan antara peneliti dengan penelitian terdahulu sebagai berikut:

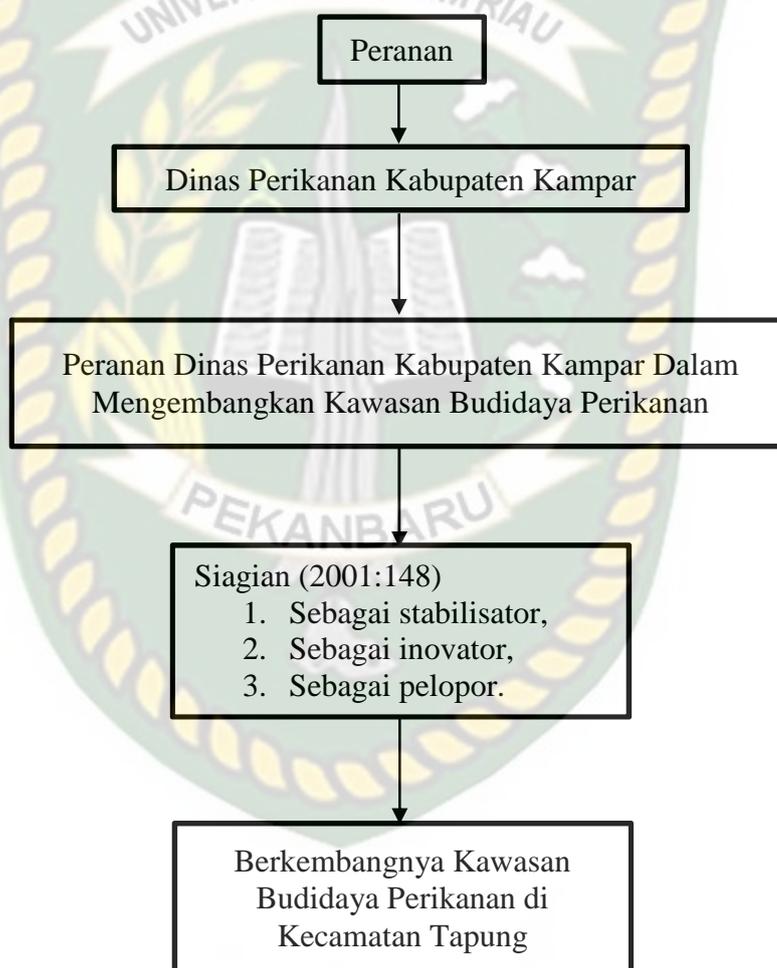
1. Penelitian Ahlalkisman, 2018. Terdapat perbedaan pada konsep teori yang digunakan dan indikator yang ditetapkan serta metode penelitian. Sementara persamaannya sama-sama meneliti di Dinas Perikanan Kabupaten Kampar.
2. Desi Kartika, 2016. Terdapat perbedaan pada konsep teori yang digunakan dan indikator yang ditetapkan serta lokasi penelitian yang berbeda. Sementara kesamaan penelitian terletak pada bidang perikanan dan metode penelitian yang digunakan.
3. Amal, 2016. Terdapat perbedaan pada konsep teori yang digunakan dan indikator yang ditetapkan dan mengangkat masalah mengenai bidang perikanan. Sementara persamaannya terletak pada metode penelitian dan lokasi penelitian.
4. Usman, 2015. Terdapat perbedaan pada konsep teori yang digunakan dan indikator yang ditetapkan. Sementara persamaannya sama-sama meneliti di Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dan metode penelitian yang digunakan.

C. Kerangka Pikiran

Kerangka pikir ini adalah untuk membantu menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisa dan memecahkan masalah yang dihadapi sehubungan

dengan penelitian Peranan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Dalam Mengembangkan Kawasan Budidaya Perikanan Di Kecamatan Tapung Hilir. Kerangka pemikiran ini bermaksud mencari kesimpulan dengan memaparkan keterkaitan antara Variabel penelitian dengan indikator-indikator penentu, seperti pada gambar berikut ini :

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Tentang Peranan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Dalam Mengembangkan Kawasan Budidaya Perikanan Di Kecamatan Tapung Hilir



Sumber: Olahan Penelitian, 2019.

D. Konsep Operasional

Definisi Operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, mendeskripsikan (menggambarkan) kegiatan atau memberikan suatu operasional atau (pekerjaan) yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut, sedangkan variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai.

Supaya penulis mudah dalam menganalisa dalam penelitian ini, berikut akan disusun dalam bentuk konsep operasional yang sebagai berikut :

1. Peranan adalah suatu usaha atau kemampuan dari orang-orang yang menduduki jabatan atau instansi yang berwenang untuk dapat menggerakkan serta menumbuhkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam mencapai suatu tujuan.
2. Pemerintah Daerah dalam penelitian ini adalah Kabupaten Kampar yang memiliki kewenangan urusan perikanan.
3. Dinas Perikanan adalah satu satu instansi yang ada di Kabupaten Kampar yang diberikan sebagian kewenangan untuk menjalankan bidang perikanan di tingkat Kabupaten.
4. Mengembangkan Kawasan Budidaya Perikanan adalah salah satu langkah atau program yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Kampar untuk meningkatkan hasil produksi ikan dan juga pemberdayaan masyarakat di bidang budidaya perikanan

5. Kecamatan Tapung Hilir salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar yang memiliki potensi untuk dijadikan kawasan budidaya perikanan.
6. Peranan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Dalam Mengembangkan Kawasan Budidaya Perikanan Di Kecamatan Tapung Hilir dalam penelitian ini dapat dilihat dari indikator yang ditetapkan berikut ini:
 - a. Stabilisator dalam penelitian ini adalah menetapkan kawasan pengembangan budidaya perikanan, menjalin kerja sama dengan masyarakat perikanan, dan memelihara hubungan dengan masyarakat budidaya perikanan.
 - b. Inovator dalam penelitian ini adalah merancang kawasan pengembangan budidaya perikanan, menggunakan teknologi dalam pengembangan perikanan, dan menerapkan sistem budidaya perikanan yang tepat sasaran.
 - c. Pelopor dalam penelitian ini adalah penelitian ini adalah menetapkan masyarakat budidaya perikanan sebagai percontohan, melakukan penelitian dan pengembangan, evaluasi hasil pelaksanaan budidaya perikanan, dan kemudian mendiskusikan hasil perikanan.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 : Operasional Variabel Tentang Peranan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Dalam Mengembangkan Kawasan Budidaya Perikanan Di Kecamatan Tapung Hilir

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian
1	2	3	4
Peranan adalah merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila orang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. (Soekanto 2004: 243)	Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan	Stabilisator	<ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan kawasan pengembangan budidaya perikanan b. Menjalin kerjasama dengan masyarakat perikanan c. Memelihara hubungan dengan masyarakat budidaya perikanan.
		Inovator	<ul style="list-style-type: none"> a. Merancang kawasan pengembangan budidaya perikanan, b. Menggunakan teknologi dalam pengembangan perikanan, c. Menerapkan sistem budidaya perikanan yang tepat sasaran.
		Pelopor	<ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan masyarakat budidaya perikanan sebagai percontohan, b. Melakukan penelitian dan pengembangan, c. Evaluasi hasil pelaksanaan budidaya perikanan, d. Mendiskusikan hasil perikanan.

Sumber : Data Olahan 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menurut Arikunto (2010:3) penelitian deskriptif yaitu penelitian yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi dalam sebuah kancan, lapangan, atau wilayah tertentu. Creswell (1994:1) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.

Penggunaan metode ini bertujuan untuk menilai secara cermat Peranan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Dalam Mengembangkan Kawasan Budidaya Perikanan di Kecamatan Tapung Hilir dengan menggunakan analisa metode kualitatif melalui fakta-fakta yang ada, kemudian untuk mendapatkan data yang jelas dan aktual dari penggunaan metode ini.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dan Kecamatan Tapung Hilir. Adapun alasan penelitian ini dikarenakan peneliti melihat bahwa Kecamatan Tapung Hilir memiliki potensi untuk dijadikan kawasan budidaya perikanan, namun sampai saat ini belum ada tindakan pemerintah melalui Dinas Perikanan untuk membangun dan memberdayakan masyarakat perikanan di Kecamatan Tapung Hilir.

C. Key Informan dan Informan

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan. Informan penelitian ini meliputi dua macam yakni key informan dan informan. Key informan adalah mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan penelitian dan informan adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti ataupun mereka yang tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial yang sedang diteliti (Hendarso dalam Suyanto, 2005; 171-172). Adapun key informan penulis adalah Kepala Bidang Budidaya Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar.

Dalam pelaksanaan keterbatasan penulis untuk meneliti seluruh pihak-pihak yang terkait, maka penulis merasa perlu untuk memilih beberapa informan yang penulis pikir cukup relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian ini. Namun pada penelitian ini, jumlah informan tidaklah terbatas pada informan yang telah ditetapkan. Informan pada penelitian ini akan terus bertambah jika penulis merasa belum mendapatkan jawaban yang sesuai dengan penelitian ini.

Pada penelitian ini, informan yang penulis tetapkan berjumlah 5 (lima) orang. Adapun keterangan informasi adalah Tenaga Penyuluh Perikanan Dinas Perikanan UPT Kecamatan Tapung Hilir, dan 3 orang Pelaku usaha budidaya perikanan di Kecamatan Tapung Hilir.

Tabel III.1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Dwi Agus Rianto	Kepala Bidang Budidaya Perikanan	Informan Kunci
2	Firdaus	Tenaga Penyuluh Perikanan Dinas Perikanan UPT Kecamatan Tapung Hilir	Informan
3	Riza Billah Darius Amin	Pelaku Usaha Perikanan di Kecamatan Tapung Hilir	Informan

Sumber: Olahan Penelitian, 2019

D. Teknik Penarikan Key Informan dan Informan

Untuk penarikan key informan maka penulis menggunakan teknik penetapan informan yaitu dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Joko (2015;25) *purposive sampling* adalah pengambilan sampel yang hanya menurut kriteria, pemikiran atau pengetahuan pengambilan sampel.

Dalam penarikan informan penulis juga menggunakan teknik penentuan informan yaitu dengan *snowball sampling*. Joko (2015;26) mengatakan pengambilan sampel yang dipakai ketika peneliti kurang mengerti tentang kondisi key informan yang menjadi target penelitiannya. Sehingga dari beberapa informan yang diambil dan diketahuinya, ia dapat mengetahui informan key informan yang menjadi target penelitiannya dari sampel yang dikenalnya.

Untuk teknik pengambilan sampel ini penentuan subjek penelitian bukan pada besarnya jumlah informan yang diperlukan untuk memberikan informasi (data), melainkan siapa saja di antara informan yang banyak atau paling banyak terlibat dalam peristiwa dan/atau memiliki informasi penting yang diperlukan dalam penelitian kualitatif ini.

Adapun key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Sumber Daya Perikanan dan Kelembagaan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dan Pelaku usaha budidaya perikanan di Kecamatan Tapung Hilir. Sedangkan informan tambahan adalah Camat Tapung Hilir, Tenaga Penyuluh Perikanan Dinas Perikanan UPT Kecamatan Tapung Hilir.

E. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan maka penulis membagi langsung ke dalam dua bagian yaitu :

1. Data primer

Yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Jawaban informan terhadap beberapa pertanyaan wawancara sesuai dengan permasalahan penelitian ini.

2. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun teknik dokumentasi dengan memanfaatkan sumber yang dapat menunjang objek yang diteliti berupa:

- a. Gambaran Umum Kabupaten Kampar
- b. Struktur organisasi Dinas Perikanan
- c. Program Dinas Perikanan
- d. Gambaran Budidaya Perikanan di Kecamatan Tapung Hilir

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Creswell (2014:206) pengumpulan data adalah sebagai rangkaian aktivitas yang saling terkait yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan riset yang muncul.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pengamatan (*Observasi*)

Yaitu melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan informasi awal dan data sekunder dari Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dan Kawasan Budidaya Perikanan Kecamatan Tapung Hilir.

2. Wawancara (*interview*)

Yaitu wawancara langsung yang penulis lakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah diarsipkan terlebih dahulu untuk memperoleh data mengenai masalah penelitian. Wawancara ini penulis lakukan untuk mendapatkan atau memperoleh data-data yang berhubungan dan berkaitan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Yaitu melakukan pengumpulan dan penghimpunan dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumentasi ini juga dilakukan sebagai bukti dari hasil observasi yang peneliti lakukan.

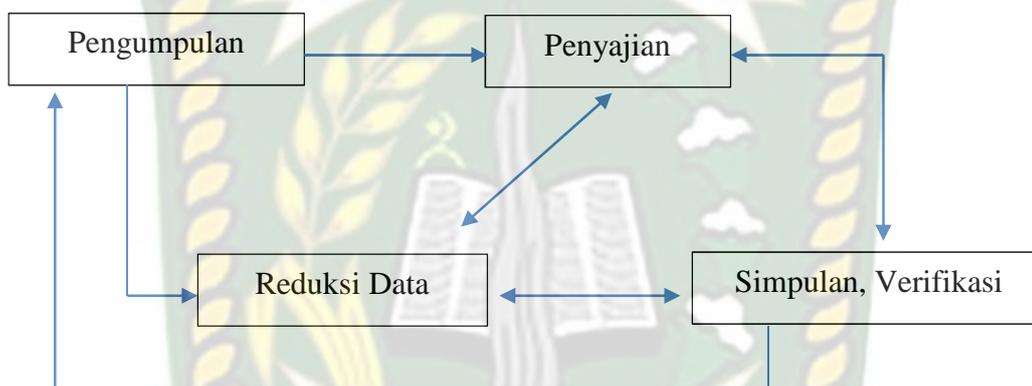
G. Teknik Analisis Data

Data-data diperoleh di lapangan harus dianalisis agar mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini. Untuk menganalisis data-data tersebut diperlukan

sebuah teknik analisis data agar dapat mempermudah proses analisis. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisa data biasanya menggunakan analisis persepsionis. Teknik persepsionis adalah cara untuk mengolah informasi data yang berupa persepsi informan terkait masalah yang sedang diteliti.

Proses analisa data dilakukan dengan alur sebagaimana tergambar di bawah ini:

Gambar III.1 : Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif



(Miles dan Huberman, 1992:20)

Teknik ini dipilih dengan pertimbangan untuk mensinkronkan proses analisis data dari berbagai sumber dan dari teknik yang berbeda sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kemudian ditarik kesimpulan. Dengan alur ini data akan disederhanakan untuk melihat keterkaitan, kategori dan sifat data sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan tepat. Adapun penjelasan mengenai komponen tersebut menurut Miles dan Huberman (1992:16-19), yaitu:

Pertama, Tahap pengumpulan data: peneliti akan melakukan proses aktivitas pengumpulan data yang bersumber dari wawancara, observasi dan dokumentasi disesuaikan dengan persoalan penelitian yang sedang dibahas.

Kedua, Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang di kode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang sedang berkembang, semuanya itu merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Ketiga, Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam pelaksanaannya penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian yang dibahas meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai suatu yang mungkin

Keempat, Menarik kesimpulan/verifikasi adalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif”, atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.

H. Jadwal Waktu Penelitian

Adapun jadwal waktu penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Peranan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Dalam Mengembangkan Kawasan Budidaya Perikanan Di Kecamatan Tapung Hilir

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2019																									
		Maret				April				Agustus				Oktober				November									
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
1	Persiapan dan penyusunan UP	x	x	x	x	x																					
2	Seminar UP						x																				
3	Revisi UP								x	x	x																
4	Penelitian Lapangan												x	x													
5	Pengelolaan dan analisi data													x	x												
6	Penyusunan laporan (skripsi)															x	x	x	x								
7	Ujian skripsi																									x	
8	Revisi skripsi																										x
9	Pengesahan dan penyerahan skripsi																										x

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A.. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

1. Geografis

Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. Dengan terbentuknya Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 yang kemudian diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam wilayah Provinsi Riau.

Sejalan dengan bergulirnya era reformasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, Kabupaten Kampar dimekarkan menjadi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Kampar ibukotanya Bangkinang, Kabupaten Pelalawan ibukotanya Pangkalan Kerinci dan Kabupaten Rokan Hulu Ibukotanya Pasir Pengarayan.

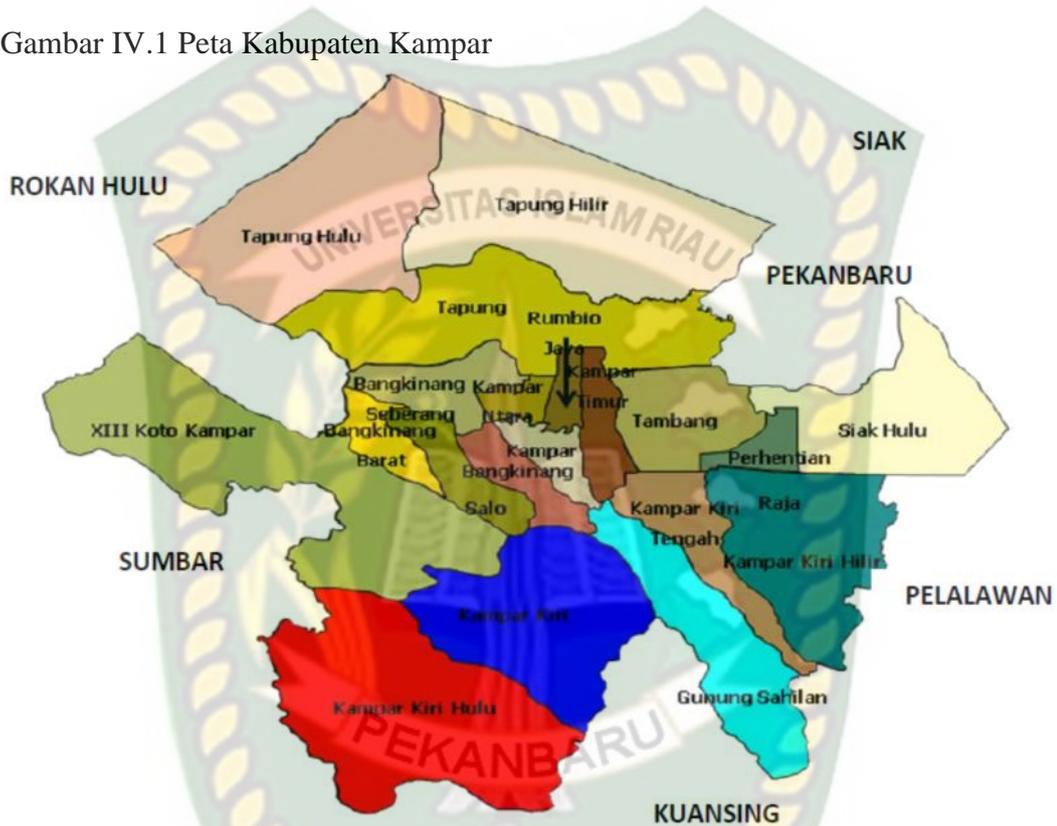
2.. Kondisi Geografis

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 Ha dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 773.171 jiwa merupakan daerah yang terletak antara 01°00'40'' Lintang Utara sampai 00°27'00'' Lintang Selatan, dan 100°28'30'' – 101°14'30'' Bujur Timur, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Gambar IV.1 Peta Kabupaten Kampar



Di Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar, yaitu Sungai Kampar yang membujur dari barat ke timur, panjangnya $\pm 413,5$ km dengan kedalaman rata-rata 7,7 M lebar rata-rata 143 M. Sungai Kampar membujur dari barat ke timur melewati beberapa kecamatan yaitu Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Bangkinang Seberang, Kampar, Kampar Timur, Rumbio Jaya, Kampar Utara, Siak Hulu dan Kampar Kiri. Selain itu terdapat pula Sungai Siak yang membujur dari barat ke timur, panjangnya ± 90 KM dengan

kedalaman rata-rata 8 – 12 M yang melintasi Kecamatan Tapung dan bermuara ke Selat Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Sungai-sungai tersebut di atas memiliki fungsi yang strategis dalam kehidupan ekonomi masyarakat, berfungsi sebagai prasarana perhubungan, sebagai sumber air bersih budi daya ikan, tempat mencari mata pencarian petani nelayan maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

3. Kondisi Topografi

Kabupaten Kampar secara umum beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata 21⁰C – 35⁰C, kelembapan nisbi rata-rata 78 – 94 persen dan curah hujan rata-rata 38 mili meter per tahun. Dari 1.128.928 Ha luas lahan Kabupaten Kampar, dapat dibagi dalam komposisi sebagai berikut :

- Tanah sawah (10.173 Ha / 0,90%);
- Pekarangan, bangunan dan halaman (84.162 Ha / 7,46%);
- Tegall kebun (92.539 Ha / 8,20%);
- Ladang huma (91.969 Ha / 8,15%);
- Padang rumput (9.876 Ha / 0,87%);
- Rawa (19.652 Ha / 1,74%);
- Kolam (1.434 Ha / 0,13%);
- Lahan sementara tidak diusahakan (12.093 Ha / 3,73%);
- Hutan Negara dan Hutan Rakyat (227.987 Ha / 20,19%);
- Perkebunan (397.023 Ha / 35,17%); dan
- Tanah lain-lain (156.181 Ha / 13,47%).

4. Penduduk

Berdasarkan hasil Registrasi Penduduk tahun 2017, jumlah penduduk Kabupaten Kampar tercatat sebanyak 773.171 orang, yang terdiri dari penduduk laki-laki 397.107 jiwa dan wanita 376.064 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.1 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar Menurut Kecamatan Tahun 2018

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Penduduk		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kampar Kiri	915,33	15.187	14.257	29.444
2	Kampar Kiri Hulu	1.301,25	6.001	5.850	11.851
3	Kampar Kiri Hilir	759,74	5.918	5.423	11.341
4	Kampar Kiri Tengah	330,59	13.834	12.683	26.517
5	Gunung Sahilan	597,97	10.117	9.154	19.271
6	XIII Koto Kampar	732,40	12.150	11.653	23.803
7	Koto Kampar Hulu	674,00	9.597	9.104	18.701
8	Kuok	151,41	12.500	12.376	24.876
9	Salo	207,83	13.007	12.597	25.604
10	Tapung	1.365,97	48.251	44.202	92.453
11	Tapung Hulu	1.169,15	40.746	37.346	78.092
12	Tapung Hilir	1.013,56	30.465	28.125	58.590
13	Bangkinang	177,18	19.608	19.168	38.776
14	Bangkinang Seberang	253,50	16.483	16.218	32.700
15	Kampar	136,28	25.030	25.051	50.081
16	Kampar Timur	173,08	12.099	11.849	23.948
17	Rumbio Jaya	76,92	8.617	8.444	17.061
18	Kampar Utara	79,84	8.448	8.593	17.041
19	Tambang	371,94	30.353	28.815	59.168
20	Siak Hulu	689,80	49.678	46.862	96.541
21	Perhentian Raja	111,54	9.018	8.297	17.315
Jumlah		11.289,28	397.107	376.064	773.171

Sumber: BPS Kampar, 2018.

B. Gambaran Dinas Perikanan Kabupaten Kampar

Dinas Perikanan Kabupaten Kampar sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 56 Tahun 2016 tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok.

Dinas Perikanan merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Perikanan.

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang perikanan. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, kewenangan di bidang perikanan;

2. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan bidang perikanan yang menjadi kewenangan kabupaten;
3. Melakukan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan teknis di bidang perikanan;
4. Pelaksanaan pemberian pengawasan teknis dan tugas-tugas pelaksanaan bidang perikanan;
5. Melakukan pengelolaan, pembinaan usaha dan pelayanan perizinan di bidang perikanan;
6. Pelaksanaan pembinaan terhadap pendayagunaan sumberdaya perikanan;
7. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, pengawasan, dan monitoring kegiatan perikanan tangkap;
8. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan/peralatan dan organisasi Dinas;
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
10. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
11. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan sebagai bahan penilaian sasaran kerja pegawai;
12. Pengelola UPT Dinas.

Bidang Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan Kegiatan Umum, dan Kepegawaian, Perencanaan dan Data serta kegiatan keuangan dilingkungan Dinas.

Uraian Tugasnya adalah :

1. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
2. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
3. Mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;
4. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum;
5. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
6. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan;
7. Melaksanakan pengelolaan administrasi program, Perencanaan, Laporan LKjIP, Laporan Penja, IKU, Renja dan Renstra;
8. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
9. Merencanakan penyusunan kebutuhan barang dan alat kelengkapan kantor;
10. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, arsip dan dokumen lainnya;
11. Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab atas keamanan kantor;
12. Pelaksanaan pengawasan terhadap disiplin pegawai, budaya bersih, budaya kerja dan budaya tertip;
13. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat dinas dan mempersiapkan Surat Perintah Tugas bagi Pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas;
14. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas;
15. Memelihara, merawat, menjaga dan mengawasi inventaris kantor;

16. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
17. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas;
18. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
19. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan/penilaian SKP bawahan;
20. Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah;
21. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
22. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan sebagai bahan penilaian sasaran kerja pegawai;
23. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok Melaksanakan Tugas dibidang Umum dan Kepegawaian.

b. Sub Bagian Program dan Perencanaan

Sub bagian Program dan perencanaan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam hal melaksanakan Tugas menyusun Rencana dan Data

c. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan dinas

Bidang Perbenihan Perikanan

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perbenihan.

Uraian tugasnya adalah :

1. Penyusunan program dan kegiatan bidang pengembangan usaha perbenihan ikan
2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan mutu benih ikan dan induk ikan unggul.
3. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengembangan benih ikan bermutu dan induk ikan unggul.
4. Pelaksanaan penerapan standarisasi serta sertifikasi mutu benih dan induk ikan.
5. Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan.
6. Monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan pembenihan ikan, pembinaan dan pengawasan mutu benih ikan dan induk ikan;
7. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
8. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan sebagai bahan penilaian sasaran kerja pegawai;

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perbenihan Perikanan terdiri dari:

a. Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Mutu Benih

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis standarisasi dan sertifikasi mutu benih.

b. Seksi pembenihan ikan

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pembenihan ikan.

Bidang Budidaya Perikanan

Bidang Budidaya Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis budidaya.

Uraian tugasnya adalah :

1. Penyusunan program dan kegiatan bidang pengembangan usaha budidaya ikan;
2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan pakan ikan;
3. Penyusunan program kegiatan bidang pengembangan budidaya ikan, pembinaan dan pengawasan pakan ikan dan pasca panen ikan;
4. Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Penyakit Ikan dan Kualitas Air;
5. Monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan budidaya ikan, pembinaan dan pengawasan pakan ikan dan pengembangan pasca panen;

6. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
7. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan sebagai bahan penilaian sasaran kerja pegawai;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikannya oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Budidaya Perikanan terdiri dari:

a. Seksi Produksi dan Kesehatan Ikan

Seksi Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan dan peningkatan produksi budidaya ikan.

b. Seksi Pakan Ikan

Seksi Pakan ikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pakan ikan.

Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan

Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penguatan daya saing produk perikanan.

Uraian tugasnya adalah :

1. Penyusunan Program dan Kegiatan bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan;
2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan usaha dan pemasaran, pengembangan sarana dan prasarana perikanan serta penguatan

kelembagaan perikanan;

3. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pembinaan usaha dan pemasaran, pengembangan sarana prasarana perikanan serta penguatan kelembagaan perikanan;
4. Penyelenggaraan pembinaan usaha dan pemasaran, pengembangan sarana prasarana perikanan serta penguatan kelembagaan perikanan;
5. Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengembangan Unit Pelaksana teknis Dinas pengolahan ikan;
6. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan usaha dan pemasaran, pengembangan sarana prasarana perikanan serta penguatan kelembagaan perikanan;
7. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
8. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan sebagai bahan penilaian sasaran kerja pegawai;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan terdiri dari:

a. Seksi Perizinan dan Bina Usaha Perikanan

Seksi Perizinan dan Bina Usaha Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pembinaan usaha, permodalan dan pemasaran.

b. Seksi Bina Mutu, Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan

Seksi Bina Mutu, Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan mutu, promosi dan pemasaran hasil perikanan.

Bidang Sumber Daya Perikanan dan Kelembagaan

Bidang Sumber Daya Perikanan Dan Kelembagaan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perlindungan sumberdaya perikanan dan lingkungan, pengendalian penyakit, kesehatan dan karantina ikan, pengembangan perikanan tangkap dan melaksanakan kebijakan penguatan kelembagaan perikanan.

Uraian tugasnya adalah :

1. Penyusunan program dan kegiatan bidang sumberdaya perikanan dan kelembagaan;
2. Perumusan kebijaksanaan teknis perlindungan sumberdaya perikanan dan lingkungan, pengendalian penyakit, dan karantina ikan serta standarisasi dan pengawasan mutu;
3. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam perlindungan sumberdaya perikanan dan lingkungan, pengendalian penyakit, kesehatan dan karantina ikan serta standarisasi dan pengawasan mutu;
4. Penyelenggaraan perlindungan sumberdaya perikanan dan lingkungan, pengendalian penyakit, dan karantina ikan serta standarisasi dan pengawasan mutu;

5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perlindungan sumberdaya perikanan dan lingkungan, pengendalian penyakit, dan karantina ikan serta penguatan kelembagaan perikanan;
6. Menyusun program, perumusan, pengidentifikasi, dan pengelolaan para nelayan dan perairan umum daratan (PUD);
7. Menyelenggarakan dan melaksanakan pengayaan stuck ikan melalui restocking, pemulihan dan domestifikasi jenis ikan local;
8. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
9. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan sebagai bahan penilaian sasaran kerja pegawai;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Perikanan Dan Kelembagaan terdiri dari seksi berikut:

a. Seksi Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Seksi Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis dalam penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang perikanan tangkap.

b. Seksi Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Perikanan

Seksi Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Perikanan di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok meningkatkan

kualitas sumberdaya manusia perikanan dan melaksanakan kebijakan teknis penguatan kelembagaan perikanan.

Setiap Pemimpin satuan Organisasi di lingkungan Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, efisiensi, efektivitas, pencapaian program dan kegiatan dan sinkronisasi baik di Lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Perikanan serta dengan unit pelaksana teknis, di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kementerian serta instansi lainnya di luar Lingkungan Dinas Perikanan sesuai dengan tugas masing-masing.

C. Modal Jaring Apung

Untuk melakukan usaha KJA diperlukan modal tetap untuk pembelian drum, jaring, kayu, besi siku, perahu motor, tabung oksigen dan lain-lain. Modal tetap terbesar adalah untuk pembelian perahu motor, drum dan tabung oksigen, sedangkan biaya yang terkecil adalah peralatan pendukung seperti tangguk, ember, dan kantong plastik.

Untuk satu unit KJA diperlukan modal tetap sebesar Rp. 56.925.000 dan biaya penyusutan setiap tahunnya sebesar Rp. 11.275.000. Biaya penyusutan terbesar adalah untuk penggantian jaring dan drum sebagai pelampung, sedangkan penyusutan terkecil adalah untuk pembelian besi-besi dan jangkar. Besarnya kecilnya penyusutan dipengaruhi oleh harga dan umur ekonomis komponen yang terdapat pada usaha KJA. Biaya tetap yang diperhitungkan dalam usaha ini adalah biaya penyusutan dari modal tetap. Biaya tetap setiap kali panen berjumlah Rp. 3.758.000.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari deskripsi peranan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dalam mengembangkan kawasan budidaya perikanan di Kecamatan Tapung Hilir, hasil pengamatan dan wawancara serta penelusuran literatur dan dokumen dengan indikator penelitian yang telah ditetapkan.

A. Peranan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Dalam Mengembangkan Kawasan Budidaya Perikanan Di Kecamatan Tapung Hilir

Salah satu tugas pokok pemerintah daerah dan perangkatnya adalah pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, perangkat pemerintahan di daerah senantiasa dituntut mengambil peran yang besar di dalam memberdayakan masyarakat yang ada di wilayahnya. Hal pemberdayaan masyarakat tersebut tidak terlepas dari ide Griffin yang mengatakan, bahwa persoalan (dan urgensi) kebijakan desentralisasi berkaitan erat dengan persoalan pemberdayaan (*empowerment*), dalam arti memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada pemerintahan di tingkat daerah untuk berprakarsa, serta wewenang dan tanggung jawab dari organisasi pemerintah tingkat daerah untuk dapat menyusun program, memilih alternatif, dan mengambil keputusan dalam mengurus kepentingan daerahnya sendiri.

Pentingnya pemberdayaan masyarakat juga didasarkan pada pemikiran *community-based resource management* (pengelolaan sumber daya lokal), yang merupakan suatu sosok manajemen pembangunan yang mencoba menjawab

tantangan pembangunan, yaitu kemiskinan, memburuknya lingkungan hidup, dan kurangnya partisipasi masyarakat di dalam proses pembangunan yang menyangkut diri mereka. Pemikiran tersebut merupakan mekanisme perencanaan *people-centered development* (pembangunan yang berorientasi pada manusia) yang menekankan pada teknologi social learning (pembelajaran sosial) dan strategi perumusan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengaktualisasikan diri mereka (*empowerment*).

Pemberdayaan masyarakat memang mutlak dilakukan, karena setiap pemerintah daerah dan perangkat daerah harus berperan besar memberdayakan warganya dengan cara memberikan rangsangan, mendorong ataupun memotivasi setiap individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Akan tetapi pada kenyataannya, upaya pemerintah daerah selama ini dalam melakukan pemberdayaan masyarakat tidaklah mudah, sehingga diperlukan cara-cara atau langkah yang tepat dalam memberdayakan masyarakat.

Pada penelitian ini, untuk mengetahui peranan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dalam mengembangkan kawasan budi daya perikanan di Kecamatan Tapung Hilir, maka penulis menetapkan beberapa indikator yang menjadi tolak ukur sebagai berikut:

1. Stabilisator

Stabilisator dalam penelitian ini adalah menetapkan kawasan pengembangan budi daya perikanan, menjalin kerja sama dengan masyarakat perikanan, dan memelihara hubungan dengan masyarakat budi daya perikanan.

Dengan demikian jelaslah bahwa di Kabupaten Kampar yang memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengembangkan kawasan budi daya perikanan adalah Dinas Perikanan, salah satu kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan pada bidang budi daya perikanan adalah Kecamatan Tapung Hilir dengan memanfaatkan Sungai Tapung.

Dalam menetapkan kawasan pengembangan budi daya perikanan di Kecamatan Tapung Hilir menurut hasil wawancara pada tanggal 17 Juli 2019 dengan Dwi Agus Rianto Kabid Budidaya Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dikatakan bahwa:

Secara legalitas tidak ada penetapan. Namun setiap tahunnya melalui Dinas Perikanan Kabupaten telah diadakan pemberdayaan masyarakat pembudidaya perikanan di seluruh wilayah Kampar terutama yang berada di pinggir sungai dan berbagai petani kolam keramba yang ada di Kampar.

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa sampai saat ini di Kecamatan Tapung Hilir belum ada secara resmi ditetapkan pemerintah Kabupaten Kampar sebagai salah satu kawasan pengembangan budi daya perikanan. Dikarenakan pemerintah Kampar secara umum telah menetapkan seluruh kawasan yang berpotensi sebagai kawasan budi daya perikanan tidak terkecuali di dalamnya terdapat di Kecamatan Tapung Hilir yang mempunyai potensi perikanan. Tanpa adanya legalitas atau penetapan khusus sebagai kawasan budi daya perikanan, Kecamatan Tapung Hilir tetap mendapat perhatian untuk pengembangan budi daya perikanan, sehingga tanpa ataupun ada legalitas kegiatan pengembangan

budi daya tetap dilaksanakan para petani perikanan dan pemerintah daerah terus berupaya membuat berbagai program pemberdayaan.

Sementara menurut Firdaus selaku Tenaga Penyuluh Perikanan Wilayah Tapung Hilir yang penulis wawancara pada tanggal 31 Juli 2019 mengatakan bahwa:

Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, Dinas Perikanan Provinsi Riau bersama FAO telah menjalin kerja sama mengembangkan budi daya perikanan di Kecamatan Tapung Hilir.

Pemerintah Kabupaten Kampar memang tidak menetapkan tempat khusus sebagai kawasan pengembangan budi daya perikanan. Namun pengembangan budi daya perikanan tetap dilaksanakan, hal ini dilihat dari adanya kegiatan pengembangan budi daya perikanan oleh pemerintah Provinsi Riau bersama FAO di Kecamatan Tapung Hilir. Hal ini mengindikasikan bahwa pengembangan kawasan budi daya perikanan dilakukan tanpa ada penetapan khusus sebagai kawasan perikanan, karena di kawasan tersebut terutama di Tapung Hilir memang telah memiliki potensi perikanan karena adanya Sungai Tapung yang bisa dijadikan tempat pengembangan budi daya perikanan.

Sedangkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 28 Juli 2019 dengan Biza Rillah, Darius, dan Amin Pelaku Usaha Budidaya Perikanan di Kecamatan Tapung Hilir menyatakan:

Pemerintah Kabupaten Kampar dan beberapa orang masyarakat pembudidaya ikan yang bersama-sama berdiskusi arah pengembangan budi daya perikanan di Tapung Hilir.

Dari tanggapan mengenai penetapan kawasan pengembangan budi daya perikanan di Kecamatan Tapung terdapat dua versi yang berbeda. Di mana Dinas Perikanan mengatakan tidak ada penetapan sementara dari tenaga penyuluh bersama masyarakat pembudidaya perikanan di Tapung Hilir mengatakan kawasan tersebut ditetapkan oleh Dinas Perikanan. Hal ini disebabkan penyuluh dan masyarakat merasakan pemberdayaan yang terus diberikan pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi, sehingga masyarakat sudah merasa ada kebijakan atau perhatian mengenai budi daya perikanan ini.

Pengamatan atau observasi yang telah penulis laksanakan diketahui bahwa penetapan kawasan pembudidaya perikanan telah ditetapkan Dinas Perikanan Provinsi Riau bersama dengan FAO yang diketahui Dinas Perikanan Kabupaten Kampar mengenai kawasan budi daya perikanan di Sungai Tapung. Sementara Dinas Perikanan Kabupaten Kampar hanya melaksanakan pemberdayaan terhadap pembudidaya perikanan di wilayah tersebut, sehingga pengembangan bidang perikanan di Kecamatan Tapung Hilir bisa berjalan beriringan antar semua elemen yang terlibat pada bidang perikanan.

Dengan adanya pemberdayaan dan kerja sama semua elemen bukan tidak mungkin kawasan budi daya perikanan di Kecamatan Tapung Hilir bisa menjadi primadona baru usaha pengembangan perikanan, sehingga terwujudnya kawasan minapolitan baru bidang perikanan di Kabupaten Kampar. Adanya upaya-upaya pengembangan yang terus dilaksanakan menjadi indikasi bahwa Sungai Tapung bersama masyarakat petani perikanan memiliki potensi besar dalam pengembangan budi daya perikanan.

Kawasan budi daya perikanan di Kecamatan Tapung Hilir ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Riau bersama FAO yang dilakukan pada tahun 2015 lalu, kemudian pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas Perikanan menetapkan kawasan tersebut pada tahun 2019. Hasil ini sebagaimana tanggapan wawancara yang diberikan informan berikut ini:

Hasil wawancara pada tanggal 31 Juli 2019 dengan Firdaus selaku tenaga Penyuluh Perikanan Wilayah Tapung Hilir diketahui bahwa:

Bulan Juni 2019 telah dilakukan penetapan kawasan Tapung Hilir sebagai salah satu lokasi pengembangan budi daya perikanan di Kabupaten Kampar bersama dengan Kawasan waduk PLTA, Sungai Kampar dan di wilayah Lipat Kain.

Pengembangan kawasan budi daya perikanan dilaksanakan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan bersama FAO telah melakukan pengembangan kawasan pada tahun 2019. Dengan demikian jelaslah bahwa pengembangan secara bersamaan antara pemerintah dengan lembaga lainnya serta diikuti masyarakat pembudidaya perikanan mulai dilakukan pada tahun 2019, sehingga diharapkan dengan kebersamaan ini bisa mewujudkan kawasan budi daya perikanan yang mampu menyejahterakan masyarakat petani perikanan dan kebutuhan akan ikan dapat terpenuhi.

Sementara dari tanggapan yang diberikan Biza Rillah, Darius, dan Amin selaku Pelaku Usaha Budidaya Perikanan di Kecamatan Tapung Hilir yang diwawancarai pada tanggal 28 Juli 2019 yakni:

Tahun 2015 yang lalu ada beberapa kegiatan berupa bantuan jaring apung dan perlengkapannya serta ada bibit ikan dari pemerintah.

Pernyataan ini menjelaskan bahwa kegiatan pembudidayaan perikanan di Kecamatan Tapung Hilir terutama yang berada di Sungai Tapung mulai ditekuni masyarakat pada tahun 2015, sehingga dengan adanya keinginan masyarakat dan potensi yang ada sebagai kawasan pengembangan budi daya perikanan yang ditetapkan pada tahun 2019 oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan bersama FAO melakukan bersama masyarakat mengembangkan kawasan ini sebagai tempat budi daya perikanan yang ke depannya diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap hasil produksi perikanan di kawasan ini.

Tabel V.1 Jenis Bantuan Yang Diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar

No.	Jenis Bantuan	Tahun 2018
1	Bantuan Barang	
	Jaring/Keramba	10 unit
	Bibit Ikan	10.000 ikan belida
	Pakan	5.000 Kg
2	Bantuan Teknis:	
	Penyuluhan	Dinas Perikanan Kampar dan Provinsi
3	Bantuan Permodalan	
	Memberikan rekomendasi usaha	Mempermudah peminjaman modal di Bank

Sumber: Olahan Peneliti, 2019

Dengan demikian jelaslah bahwa penetapan kawasan pengembangan budi daya perikanan telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kampar maupun Provinsi Riau walaupun tidak tertulis secara jelas namun pengembangannya terus dilakukan sebagai bentuk upaya budi daya perikanan. Dengan adanya berbagai kegiatan untuk penetapan kawasan ini menjadikan pembudidaya perikanan di Kecamatan Tapung Hilir, saat ini petani budi daya perikanan semakin bertambah

jumlahnya dan perekonomian masyarakat bisa semakin membaik dengan adanya peluang ekonomi baru di kawasan tersebut. Dikarenakan satu usaha yang dilakukan berhasil bisa menurunkan usaha-usaha turunan yang mengikutsertai perkembangannya.

Dasar penetapan kawasan budi daya perikanan di Kecamatan Tapung Hilir dikarenakan adanya potensi perikanan yang besar bisa dikembangkan pada sungai Tapung dan kawasan lainnya. Hasil wawancara pada tanggal 17 Juli 2019 dengan Dwi Agus Rianto Kabid Budidaya Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar diketahui bahwa:

Tidak ada. Namun di Tapung Hilir khususnya sangat layak untuk dikembangkan berbagai budi daya perikanan air tawar khususnya ikan nila, patin dan dari hasil penelitian lembaga lain seperti FAO ada potensi untuk pengembangan budi daya ikan belida.

Sementara dari tanggapan Firdaus selaku tenaga Penyuluh Perikanan Wilayah Tapung Hilir yang penulis wawancara pada tanggal 31 Juli 2019 diketahui informasi bahwa:

Adanya potensi pengembangan budi daya jenis ikan belida di Kecamatan Tapung Hilir. Potensi ini menjadi angin segar untuk petani budi daya perikanan dalam memperbanyak jenis ikan yang bisa di budi daya pada jaring apung di sepanjang Sungai Tapung.

Adanya potensi perikanan di Kecamatan Tapung Hilir memberikan angin segar bagi masyarakat setempat untuk ikut serta ambil bagian dalam melakukan budi daya perikanan dan bahkan menjadikan budi daya perikanan sebagai mata pencaharian dan perekonomian baru bagi masyarakat. Potensi perikanan yang

begitu besar dengan memanfaatkan Sungai Tapung bisa dijadikan usaha baru dalam upaya menyejahterakan masyarakat setempat, sehingga percepatan pertumbuhan perekonomian di suatu wilayah bisa tumbuh dengan adanya budi daya perikanan.

Sementara dari hasil wawancara peneliti dengan Biza Rilla, Darius, Amin selaku pelaku usaha perikanan pada 28 Juli 2019 diperoleh informasi sebagai berikut:

Karena sungai Tapung yang luas dan panjang memiliki potensi besar bagi hidupnya berbagai jenis ikan serta tempat yang strategis untuk dibudidayakan berbagai jenis ikan sesuai dengan karakteristik dari ikan tersebut.

Jenis budi daya perikanan yang ditetapkan di kawasan budi daya Kecamatan Tapung Hilir sampai saat ini belum ada, namun dari pengamatan yang dilakukan kebanyakan pembudidaya perikanan adalah ikan patin dan ikan baung serta jenis lainnya. Sementara dari hasil penelitian yang dilakukan bersama antara pemerintah dengan masyarakat petani perikanan, didapati bahwa potensi budi daya jenis ikan lainnya sangat besar di Sungai Tapung yakni ikan belida.

Hasil wawancara pada tanggal 17 Juli 2019 dengan Dwi Agus Rianto Kabid Budidaya Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar diketahui bahwa:

Sesuai dengan lingkungan, ikan yang di budi daya harus sesuai dengan karakteristik dari sungai tersebut, sehingga bisa memberikan hasil bagi petani dan mendukung perekonomian petani.

Sementara dari tanggapan Firdaus selaku Tenaga Penyuluh Perikanan Wilayah Tapung Hilir yang diwawancara pada tanggal 31 Juli 2019 menyebutkan:

Budidaya ikan belida. Tetapi saat ini yang paling banyak masih ikan nila dan ikan patin. Sementara ikan belida masih dalam tahap percobaan di kolam-kolam Dinas Perikanan

Tanggapan ini juga sejalan dengan informasi yang diberikan Biza Rillah, Darius, dan Amin Pelaku Usaha Budidaya Perikanan di Kecamatan Tapung Hilir yang diwawancarai pada tanggal 28 Juli 2019 yakni:

Ikan baung. Tetapi yang saat ini sedangkan di budi dayakan masyarakat adalah ikan nilai, ikan patin. Tetapi tidak menutup kemungkinan adanya jenis ikan lain yang lebih memiliki nilai ekonomis dan berpotensi untuk dikembangkan di Sungai Tapung.

Dengan demikian jelaslah bahwa jenis ikan yang bisa dibudidayakan secara ideal di Tapung Hilir adalah ikan patin, nilai, baung, dan belida. Hasil ini memberikan gambaran bahwa betapa besarnya potensi perikanan yang bisa dilakukan di Kecamatan Tapung Hilir, potensi ini bisa dikembangkan apabila semua elemen termasuk pemerintah daerah turut serta memberikan motivasi yang besar kepada masyarakat tentunya akan menghasilkan produksi perikanan yang besar di Kecamatan Tapung Hilir.

Hasil pengamatan yang dilakukan di kawasan Sungai Tapung sangat banyak terdapat kerambah yang telah dibangun masyarakat, namun jenis ikan yang di budi dayakan masih terbatas jenisnya yakni ikan patin, baung, dan nila. Sementara ikan-ikan jenis lainnya masih sedikit jumlahnya seperti ikan gurami dan ikan belida. Untuk itu, potensi yang besar ini tidak bisa disia-siakan begitu saja, perlu upaya semua pihak untuk mengembangkan kawasan ini menjadi kawasan yang berpotensi menghasilkan ikan dalam jumlah yang besar.

Dalam pengembangan kawasan budi daya perikanan dibutuhkan kerja sama antar pihak untuk mewujudkan budi daya perikanan yang bisa menyejahterakan masyarakat. Di mana hasil tanggapan yang diberikan dari wawancara peneliti pada tanggal 31 Juli 2019 dengan Firdaus selaku Tenaga Penyuluh Perikanan Wilayah Tapung Hilir mengatakan bahwa:

Antara kelompok budidaya perikanan dengan LPMUKP (Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan) kerjasama dalam hal permodalan

Kerja sama antara kelompok sangat diperlukan dalam hal pengembangan kawasan budi daya perikanan. Kerja sama ini bisa dilakukan apabila semua pihak turut serta merasakan adanya kepentingan untuk menyejahterakan yakni pemerintah berkepentingan menyejahterakan masyarakat dan masyarakat membutuhkan kesejahteraan hidup, sementara swasta berkepentingan untuk mengembangkan produksi-produksi perikanan menjadi suatu produk yang bisa dijual dan bernilai ekonomis.

Kerjasama yang dilakukan berupa penyaluran dana bergulir dan bantuan-bantuan kepada pembudidaya perikanan. Pertanyaan ini sebagaimana diungkapkan dari wawancara pada tanggal 31 Juli 2019 dengan Firdaus selaku tenaga Penyuluh Perikanan Wilayah Tapung Hilir berikut ini:

LPMUKP menyalurkan dana bergulir bagi kelompok yang ingin mendapatkan modal usaha dengan bunga rendah 3% dengan periode bisa perbulan, per 3 bulan dan per semester.

Setelah terciptanya kerja sama, maka dibutuhkan langkah-langkah berikutnya untuk menjalin hubungan yang erat lagi dalam bidang perikanan. Di

mana langkah yang ditempuh biasanya berupa komunikasi dan koordinasi yang dilakukan secara berkesinambungan.

Hasil wawancara pada tanggal 31 Juli 2019 dengan Firdaus selaku tenaga Penyuluh Perikanan Wilayah Tapung Hilir diketahui bahwa:

Menjaga komunikasi dan silaturahmi dengan masyarakat. melakukan supervisi/evaluasi setiap per 3 bulan terhadap usaha budidaya masyarakat memberikan/penyaluran bantuan yang merata bagi kelompok budidaya yang sudah terbina dan terdaftar di dinas.

Sementara menurut tanggapan dari informasi dari Biza Rillah, Darius, dan Amin pelaku budi daya perikanan di Kecamatan Tapung Hilir yang diwawancarai pada tanggal, 28 Juli 2019 yakni:

Memberikan solusi supaya aktivitas budi daya perikanan di Sungai Tapung tetap bertahan dan mampu memberikan peningkatan perekonomian bagi masyarakat

Dengan demikian jelaslah bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Kampar telah melakukan tugas dan fungsinya dengan menjalankan peran sebagai stabilisator dalam pengembangan kawasan budi daya perikanan di Kecamatan Tapung Hilir. Hal ini menggambarkan bahwa adanya perhatian pemerintah daerah dan provinsi untuk mengembangkan budi daya perikanan di kawasan Tapung Hilir, sehingga diharapkan bantuan dan pemberdayaan yang diberikan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan memberi dampak terhadap kesejahteraan petani ikan.

Di mana dari pengamatan yang telah penulis lakukan pemerintah daerah belum menetapkan kawasan sungai Tapung sebagai kawasan budi daya perikanan

secara resmi dan tertuang dalam suatu kebijakan. Namun saat ini telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas perikanan dengan memberikan bantuan-bantuan kebutuhan budi daya perikanan berupa jaring keramba, bibit ikan, dan pakan ikan kepada pembudidaya. Dengan begitu peranan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dalam mengembangkan kawasan budi daya perikanan sudah mulai terlihat berdasarkan dari penetapan kawasan, menjalin kerja sama, dan menjaga hubungan dengan pembudidaya perikanan di Kecamatan Tapung Hilir.

2. Inovator

Inovator dalam penelitian ini adalah merancang kawasan pengembangan budidaya perikanan, menggunakan teknologi dalam pengembangan perikanan, dan menerapkan sistem budidaya perikanan yang tepat sasaran.

Untuk melakukan usaha budi daya perikanan diperlukan modal tetap untuk pembelian drum, jaring, kayu, besi siku, perahu motor, tabung oksigen dan lain-lain. Modal tetap terbesar adalah untuk pembelian perahu motor, drum dan tabung oksigen, sedangkan biaya yang terkecil adalah peralatan pendukung seperti tangguk, ember, dan kantong plastik.

Untuk satu unit KJA diperlukan modal tetap sebesar Rp. 56.925.000 dan biaya penyusutan setiap tahunnya sebesar Rp. 11.275.000. Biaya penyusutan terbesar adalah untuk penggantian jaring dan drum sebagai pelampung, sedangkan penyusutan terkecil adalah untuk pembelian besi-besi dan jangkar. Besarnya kecilnya penyusutan dipengaruhi oleh harga dan umur ekonomis komponen yang terdapat pada usaha KJA. Biaya tetap yang diperhitungkan dalam usaha ini adalah

biaya penyusutan dari modal tetap. Biaya tetap setiap kali panen berjumlah Rp. 3.758.000.

Selain modal tetap untuk usaha KJA juga diperlukan modal kerja atau biaya tidak tetap seperti pembelian bibit, pakan ikan, dan biaya perawatan. Untuk satu unit keramba dengan jumlah sepuluh kantong diperlukan modal kerja sebanyak Rp. 61.700.000 setiap kali panen pengeluaran terbesar untuk modal kerja untuk operasional KJA adalah untuk pembelian pakan yang jumlahnya lebih dari 70% biaya produksi. Besarnya biaya pakan yang berasal dari pellet menyebabkan petani ikan nila menggunakan pakan tambahan dari daun-daunan seperti daun ubi, daun talas dan kangkung. Menurut petani ikan dengan penambahan pakan daun-daunan dapat menekan biaya pakan.

Besarnya biaya dalam pembuatan satu jaring apung menyebabkan tidak banyak masyarakat yang ambil bagian dalam budi daya perikanan, sehingga yang ikut budi daya perikanan masih terbatas jumlahnya. Padahal potensi perikanan sangat besar untuk dikembangkan dan bila mampu dikelola dengan baik bisa memberikan nilai ekonomis yang sangat besar bagi petani.

Hasil wawancara pada tanggal 17 Juli 2019 dengan Dwi Agus Rianto selaku Kabid Budidaya Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar diketahui bahwa:

Menggunakan padat tebar yang optimum sesuai dengan daya dukung yang dimiliki petani budi daya perikanan di Sungai Tapung.

Begitu juga dengan tanggapan yang diberikan Biza Rillah, Darius, dan Amin selaku Pembudidaya Perikanan yang diwawancarai pada tanggal 28 Juli berikut ini

Hanya memakai alat tradisional dalam pengembangan pembuatan keramba jaring apung. Tetapi saat ini telah berubah dengan menggunakan jaringan baja ringan sebagai penopang dari jaring, sehingga lebih tahan lama dari sebelumnya.

Hasil pengamatan yang penulis laksanakan terlihat pengembangan ataupun inovasi yang dilakukan masih sebatas pengembangan perangkat pembuatan jaring apung yang sebelumnya menggunakan kayu atau bambu sebagai penopang jaring, sekarang menggunakan baja ringan. Inovasi penopang ini lebih menguntungkan karena lebih tahan lama dan lebih ringan, sehingga dengan menggunakan inovasi pengembangan penopang ini memperkecil biaya produksi pembudidaya perikanan yang menggunakan jaring apung.

Inovasi sangat diperlukan dalam usaha mengembangkan budi daya perikanan, mulai dari peralatan budi daya seperti jaring apung yang bisa tahan lama, jenis pakan yang bisa diproduksi sendiri, dan masa panen yang lebih cepat, serta inovasi lainnya bisa memberikan dampak yang cukup besar dalam mengurangi biaya produksi dan juga memberikan keuntungan yang lebih besar lagi. Untuk itu, ke depan inovasi-inovasi budi daya perikanan perlu terus dikembangkan baik dari petani sendiri maupun penelitian-penelitian yang dilakukan pemerintah terutama Dinas Perikanan agar usaha menjadikan Kabupaten Kampar sebagai sentra minapolitan di Provinsi Riau bisa terwujud dengan mengandalkan berbagai kawasan yang menghasilkan perikanan.

Dengan demikian, dalam masalah inovasi pengembangan budi daya perikanan di Kawasan Tapung Hilir belum berjalan dengan baik. Di mana pembudidaya perikanan masih menggunakan sarana prasarana yang bersifat tradisional dan belum menggunakan teknologi tepat guna yang bisa menghasilkan produktivitas hasil budi daya perikanan yang besar. Namun untuk perangkat penopang saat ini sudah berganti dengan menggunakan baja ringan sebagai bahan utamanya, sehingga walaupun masih kecil sudah ada inovasi-inovasi yang mulai dikembangkan di Tapung Hilir.

3. Pelopor

Pelopor dalam penelitian ini adalah penelitian ini adalah menetapkan masyarakat budi daya perikanan sebagai percontohan, melakukan penelitian dan pengembangan, evaluasi hasil pelaksanaan budi daya perikanan, dan kemudian mendiskusikan hasil perikanan.

Dinas Perikanan Kabupaten Kampar sebagai pelopor untuk pengembangan kawasan budi daya perikanan di Kecamatan Tapung Hilir dimulai dari penetapan masyarakat sebagai target untuk dibina. Di mana menurut hasil wawancara pada tanggal 17 Juli 2019 dengan Dwi Agus Rianto selaku Kabid Budidaya Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar sebagai berikut:

Pelaku usaha budidaya perikanan dan dari pemerintah daerah sendiri yang telah mencanangkan menjadikan Kampar sebagai sentra minapolitan di bidang perikanan.

Begitu juga dengan tanggapan yang diberikan Firdaus selaku Tenaga Penyuluh Perikanan Wilayah Tapung Hilir yang diwawancarai pada tanggal 31 Juli 2019 menyatakan bahwa:

Masyarakat yang sudah memiliki kelompok budidaya dan mempunyai administrasi yang lengkap dan usahanya berjalan dengan lancar.

Kelompok masyarakat yang dibina dijadikan percontohan merupakan petani-petani budi daya perikanan yang sebelumnya telah memiliki kelompok-kelompok kecil, sehingga memudahkan pemerintah dalam melakukan pemberdayaan.

Hasil wawancara pada tanggal 31 Juli 2019 dengan Firdaus selaku tenaga Penyuluh Perikanan Wilayah Tapung Hilir menyatakan bahwa:

Kelompok yang benar-benar dibina, mandiri dan berdikari sendiri punya inovasi (lebih dari 1 kelompok)

Sementara dari tanggapan Biza Rillah, Darius, dan Amin Pelaku Budi daya perikanan di Kecamatan Tapung Hilir yang diwawancarai pada tanggal 28 Juli 2019 yakni

Ada sekitar 9 orang yang telah melakukan budidaya perikanan dan masih banyak masyarakat pembudidaya yang belum diberdayakan dan tergabung dalam kelompok budbudi daya perikanan di Sungai Tapung.

Masih sedikitnya jumlah pembudidaya yang dibina dan diberdayakan di Kecamatan Tapung hilir menyebabkan belum produktifnya hasil produksi yang diberikan dari budi daya perikanan di Kecamatan Tapung hilir. Dengan demikian hasil yang diberikan belum maksimal, sehingga dibutuhkan cara atau langkah

yang lebih tepat pada masa mendatang untuk memberikan motivasi kepada masyarakat budi daya perikanan.

Hasil wawancara pada tanggal 17 Juli 2019 dengan Dwi Agus Rianto selaku Kabid Budidaya Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar mengatakan:

Hampir setiap tahunnya produksi hasil budi daya perikanan di Tapung Hilir meningkat jumlahnya.

Pernyataan di atas memberikan gambaran bahwa budi daya perikanan di Tapung Hilir mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga dengan adanya peningkatan diharapkan perekonomian masyarakat petani ikan akan semakin baik dan memberi peluang atau kesempatan bagi masyarakat lainnya untuk bekerja ataupun membuka usaha yang sama melalui pemanfaatan Sungai Tapung sebagai tempat pembudidayaan perikanan.

Hasil pengamatan yang telah penulis laksanakan terlihat jelas bahwa pertanyaan di atas dengan di lapangan tidak jauh berbeda. Di mana saat ini produksi ikan hasil budi daya jumlahnya semakin meningkatkan, peningkatan ini dikarenakan bertambahnya jumlah kerambah jaring apung yang ada di Tapung dan juga jumlah petani budidaya perikanan yang semakin giat untuk meningkatkan produksinya.

Sementara dari hasil wawancara pada tanggal 31 Juli 2019 dengan Firdaus selaku tenaga Penyuluh Perikanan Wilayah Tapung Hilir yakni:

Dapat menggugah minat kelompok lain untuk ikut serta membuka diri untuk dibina dan dimajukan usahanya. Kelompok percontohan bisa jadi motivator bagi kelompok budidaya lainnya.

Adanya peningkatan produktivitas hasil budi daya perikanan di Kecamatan Tapung Hilir dari tahun-tahun sebelum adanya pemberdayaan dan penetapan kawasan perikanan, sehingga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Namun masih rendahnya tingkat produktivitas tersebut dibutuhkan kerja sama dan langkah yang lebih tepat lagi dari berbagai kalangan mulai dari pemerintah daerah, petani pembudidaya, maupun dari lembaga luar yang yang konsen mengembangkan budi daya perikanan, agar hasil budi daya perikanan di Kecamatan Tapung Hilir lebih meningkat lagi.

Hasil produksi yang setiap tahunnya meningkat dikarenakan semakin bertambahnya jumlah keramba jaring apung dan jumlah petani, serta adanya pengembangan jenis-jenis ikan yang layak untuk di budidaya pada sungai Tapung. Hasil ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat pembudidaya perikanan yang serius dalam menjalankan usahanya, sehingga usaha budi daya perikanan menjadi sumber pendapatan dan menarik masyarakat lainnya untuk turut serta berusaha membudidayakan perikanan. Selain itu adanya peran atau campur tangan dari pemerintahan daerah maupun provinsi yang melakukan penyuluhan dan pemberdayaan bagi masyarakat petani juga menjadi penentu meningkatkan produksi ikan budi daya di Tapung Hilir.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan *peranan* Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dalam mengembangkan kawasan budi daya berikut ini:

1. Kawasan Tapung Hilir layak untuk dikembangkan sebagai kawasan budi daya perikanan, dikarenakan di Sungai Tapung dari hasil riset dan

percobaan yang telah dilakukan bisa dikembangkan berbagai jenis ikan seperti patin, nila, selais, baung, bahkan belida.

2. Belum adanya kebijakan yang dikeluarkan untuk penetapan kawasan budi daya perikanan di Kabupaten Kampar. Tetapi kegiatan pemberdayaan bidang perikanan tetapi dilaksanakan setiap tahunnya.
3. Adanya kerja sama antara masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga independen seperti FAO dalam pengembangan budi daya perikanan di Tapung Hilir.
4. Adanya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat budi daya perikanan seperti memberikan penyuluhan perikanan, bantuan jaring dan bibit, serta pemberian peluang bantuan dana bergulir.
5. Telah terbentuknya kelompok-kelompok budi daya perikanan di Tapung Hilir dan adanya inovasi pengembangan keramba jaringan apung dengan menggunakan penopang dari baja ringan.
6. Bertambahnya jumlah pembudi daya dan keramba jaring apung serta meningkatnya produksi ikan hasil budi daya.

Dengan demikian jelaslah bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kampar telah turut berperan dalam mengembangkan kawasan budi daya perikanan di Kecamatan Tapung Hilir. Walaupun pengembangan tersebut tidak disertai dengan kebijakan atau peraturan mengenai budi daya perikanan, namun pengembangan budi daya perikanan tetap dilakukan melalui kewenangan dari Dinas Perikanan Kabupaten Kampar.

B. Faktor Penghambat Peranan Dinas Perikanan dalam Mengembangkan Kawasan Budidaya Perikanan Di kecamatan Tapung Hilir

Dalam mengembangkan kawasan budi daya perikanan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kampar di Kecamatan Tapung Hilir terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, yaitu:

1. Kurangnya Anggaran

Rendahnya atau kecilnya anggaran yang dimiliki pemerintah Kabupaten Kampar menyebabkan terbatasnya program pemberdayaan yang bisa dilakukan Dinas Perikanan, karena alokasi anggaran yang diberikan kecil, sehingga program-program yang diberikan hanya berupa bantuan pembinaan dalam bentuk pelatihan dan bantuan jaring untuk keramba jaring apung yang jumlahnya sangat terbatas.

Wawancara pada tanggal 17 Juli 2019 dengan Dwi Agus Rianto selaku Kabid Budidaya Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar mengatakan:

Rendahnya alokasi anggaran yang diterima Dinas Perikanan setiap tahunnya memberi dampak pada upaya pengembangan potensi perikanan yang ada di Kampar terutama pada pemberdayaan masyarakat petani perikanan.

Pernyataan di atas memberikan gambaran bahwa pemerintah Kabupaten Kampar mengalokasikan anggaran dana kepada Dinas Perikanan untuk kegiatan sangat kecil yakni sebesar Rp. 16.724.560.025,-. Kecilnya anggaran menyebabkan Dinas Perikanan belum mampu untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat perikanan dengan menjalankan berbagai program pengembangan budi daya perikanan. Adapun yang bisa diberikan pemerintah saat ini hanya sebatas

penyuluhan-penyuluhan dan bantuan sarana prasarana budi daya perikanan yang masih minim jumlahnya.

2. Kebijakan

Belum adanya kebijakan khusus yang mengatur mengenai budi daya perikanan, sehingga menyulitkan pemerintah daerah untuk melakukan inovasi-inovasi budi daya perikanan khususnya yang berada di sungai. Kebijakan yang ada saat ini hanya berlandaskan tugas dan fungsi Dinas Perikanan untuk menjalankan kewenangannya hanya berupa memberikan bantuan, pembinaan dan pemberdayaan, sementara untuk inovasi diserahkan kepada petani budi daya perikanan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peranan Dinas Perikanan dalam mengembangkan kawasan budi daya perikanan di Kecamatan Tapung Hilir belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal. Hasil dapat dinyatakan dari masing-masing indikator penelitian, yakni:
 - a. Indikator stabilisator. Dinas Perikanan sudah melakukan langkah-langkah pemberdayaan kepada masyarakat melalui pemberian bantuan dan penyuluhan, namun ada kebijakan khusus untuk menetapkan kawasan budi daya perikanan di Tapung Hilir.
 - b. Indikator peloporan. Dinas Perikanan telah melakukan peloporan melalui melakukan kerja sama - kerja sama dengan masyarakat atau kelompok petani dan lembaga-lembaga lainnya yang membidangi perikanan seperti FAO, dalam memberdayakan masyarakat pembudidaya perikanan di Tapung Hilir.
 - c. Indikator inovator. Belum adanya langkah-langkah konkret mengembangkan budi daya perikanan dengan mengedepankan teknologi, sehingga budi daya perikanan masih dilakukan secara tradisional atau dengan kebiasaan yang di masyarakat. Namun hasil produksi budi daya

perikanan setiap tahunnya meningkat dikarenakan semakin bertambahnya jumlah petani ikan di Tapung Hilir. Dengan demikian jelaslah bahwa peranan Dinas Perikanan masih sebatas formalitas sebagai pelaksana di bidang perikanan belum sampai kepada melakukan inovasi bidang perikanan.

2. Dalam mengembangkan kawasan budi daya perikanan di Kecamatan Tapung Hilir terdapat kendala dalam pelaksanaannya yakni kendala sumber daya anggaran yang dialokasikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dan belum adanya kebijakan khusus yang diterbitkan mengenai penetapan kawasan budi daya perikanan di Kabupaten Kampar khususnya di Tapung Hilir, sehingga pengembangan dan pemberdayaan masyarakat perikanan menjadi kurang maksimal.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah daerah melakukan pendataan masyarakat pembudidaya perikanan di Kecamatan Tapung Hilir secara menyeluruh, sehingga dapat dipetakan potensi perikanan dan jenis bantuan pemberdayaan yang tepat untuk diberikan.
2. Bagi Dinas Perikanan hendaknya memperjuangkan anggaran yang lebih besar untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil perikanan dari upaya pemberdayaan yang dilakukan.
2. Hendaknya pemerintah daerah Kabupaten Kampar membuat peraturan daerah sebagai bentuk perhatian kepada petani keramba jaring apung ataupun

budidaya perikanan yang nanti bisa dijadikan salah satu sumber pendapatan asli daerah

3. Hendaknya kepada masyarakat budi daya perikanan tidak pernah bosan mengusulkan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk mendukung usaha kegiatan budidaya, agar kualitas ikan yang dihasilkan lebih baik dan dalam jumlah banyak.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku:

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cresswell, John W. 1994. *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publication.
- Cresswell, John W. 2014. *Penelitian Kualitatif & Riset. Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Effendy, Onong Uchjana, 2009. *Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Effendi, I. 2006. *Pengantar Akuakultur*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Eko, Sutoro. 2004. *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: APMD Press.
- Kansil, dan Christine. 2008. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Kusnandi, Sumarjono, Sulistiowati, Yunita, Subchan, Puji. 2005. *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara
- Lubis, Solly, 2007, *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Miles, Matthew & Huberman, A Michael. 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Misdianti dan Kartasapoetra. 1993. *Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto. 1994. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. LP3ES. Jakarta.
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Rineka Cipta
- Nurcholis, Hanif 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2006. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Rosyadi, Slamet. 2010. *Paradigma Manajemen Pembangunan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Saebani, Ahmad Beni. 2008. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Siagian, Sondang. P. 2001. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumardi. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafiie, Inu Kencana. 2004. *Birokrasi Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Syafiie, Inu Kencana. 2009. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Syafiie, Kencana Inu, 2010. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Bandung: Bumi Aksara.
- Syafiie, Inu Kencana. 2014. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Rineka Cipta.
- Thoha, Miftah. 1995. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Bupati Kampar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Tahun 2016-2021

Skripsi/Jurnal:

- Ahlalkisman. 2018. Fungsi Dinas Perikanan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Keramba Jaring Apung Di Kabupaten Kampar. Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL-UI.
- Amal. 2016. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Barru. Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL-UNHAS.
- Hasi, L. 2012. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Mengawasi Kelestarian Terumbu Karang Kabupaten Wakatobi. Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. II, No. 2, Oktober 2012.
- Kartika, Desi. 2016. Peranan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Penumbuhan Dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan Tahun 2014 (Studi Di Desa Telaga Kecil Kecamatan Siantan Selatan). Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Pratama, Phutut Eka. 2017. Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Menggali Pendapatan Asli Daerah di Sektor Perikanan Kota Bitung. EKSEKUTIF Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 2 No. 2 Tahun 2017.
- Suriani. 2013. Peran Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Dalam Konservasi Hutan Mangrove di Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang. eJournal Ilmu Pemerintahan, 2013, 1 (3): 913-923.
- Usman. 2015. Pelaksanaan Program Pengembangan Produksi Ikan Kolam Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kampar 2010-2013 (Studi Kasus Desa Koto Masjid Kecamatan XII Koto Kampar). Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau.